

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*)

**31 MARET 2010 DAN 2009
SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2010 dan 2009
serta periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009
Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Rinaldi Firmansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Cibitung I No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Sudiro Asno
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Rancakendal No. 8A, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian P. T. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, **29** April 2010


Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama




Sudiro Asno
Direktur Keuangan

KATA PENGANTAR

Berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian (*Unaudited*) Perusahaan Perseroan (Persero) P. T. Telekomunikasi Indonesia Tbk ("TELKOM") untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, beserta Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sejak 1 Januari 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia memberlakukan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 1 tentang Pencabutan Standar Akuntansi diantaranya adalah PSAK 35 : Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi. PPSAK No. 1 berpengaruh pada penyajian Pendapatan Interkoneksi dalam Laporan Laba Rugi Konsolidasian, yang semula Pendapatan Interkoneksi disajikan secara bersih (*net*) – setelah dikurangi beban usaha. Selain itu, pada tahun 2010, TELKOM juga menyajikan Pendapatan Interkoneksi Outgoing yang sebelumnya disajikan sebagai Pendapatan Interkoneksi menjadi Pendapatan Telepon Tidak Bergerak dan Seluler. Untuk memberikan daya banding maka penyajian triwulan 1 tahun 2009 disesuaikan dengan penyajian baru sebagaimana triwulan 1 tahun 2010.

Sampai dengan 31 Maret 2010, TELKOM mencatat kenaikan Pendapatan Usaha sebesar Rp969 milyar atau 6,20% dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika naik sebesar Rp988 milyar atau 24,65%. Sementara itu, Pendapatan Telepon Tetap dan Interkoneksi turun masing-masing sebesar Rp241 milyar atau 6,73% dan Rp75 milyar atau 6,89%.

TELKOM mencatat kenaikan Beban Usaha sampai dengan 31 Maret 2010 sebesar Rp935 milyar atau 9,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp142 milyar dan Beban Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp505 milyar sejalan dengan penambahan aset produktif. Pada akhirnya Laba Bersih mengalami kenaikan sebesar Rp319 milyar atau 12,97%.

Akhirnya atas nama segenap anggota Direksi Perusahaan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra TELKOM Group, sehingga memungkinkan Perusahaan mencapai hasil sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan terlampir dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan performa lebih baik lagi pada periode berikutnya.

Jakarta, ~~29~~ April 2010



RINALDI FIRMANSYAH

Direktur Utama

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**31 MARET 2010 DAN 2009
SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Keuangan Konsolidasian	
Neraca Konsolidasian	1-3
Laporan Laba Rugi Konsolidasian	4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5-6
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7-8
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-122

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN (UNAUDITED)

31 MARET 2010 DAN 2009

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2010	2009
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,4,44	6.751.059	6.509.704
Penyertaan sementara	2c,2f,44	359.182	287.558
Piutang usaha	2c,2g,5,36,44		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp108.600 juta di tahun 2010 dan Rp114.447 juta di tahun 2009		849.181	770.121
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp1.307.314 juta di tahun 2010 dan Rp1.174.383 juta di tahun 2009		3.263.173	3.003.901
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp10.065 juta di tahun 2010 dan Rp7.734 juta di tahun 2009	2c,2g,44	109.575	102.809
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp75.524 juta di tahun 2010 dan Rp68.111 juta di tahun 2009	2h,6,36	504.283	493.683
Beban dibayar di muka	2c,2i,7,44	2.552.848	2.087.031
Tagihan restitusi pajak	2s,38	278.583	222.954
Pajak dibayar di muka	2s,38	388.451	803.700
Aset lancar lainnya	2c,8,44	52.499	43.201
Jumlah Aset Lancar		<u>15.108.834</u>	<u>14.324.662</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang - bersih	2f,9	155.894	170.184
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp75.343.209 juta di tahun 2010 dan Rp64.853.338 juta di tahun 2009	2k,2l,3,10, 18,19,22	75.405.335	71.165.921
Aset tetap Pola Bagi Hasil - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp188.471 juta di tahun 2010 dan Rp272.514 juta di tahun 2009	2m,11,33,46	348.580	453.847
Pensiun dibayar di muka	2i,2r,41	614	176
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2k,2o,12, 28,44,48	3.155.177	2.260.788
<i>Goodwill</i> dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp7.953.745 juta di tahun 2010 dan Rp6.641.019 juta di tahun 2009	2d,2j,3,13,36	2.219.474	2.873.087
Rekening <i>escrow</i>	2c,14,44	42.613	44.105
Aset pajak tangguhan - bersih	2s,38,53	97.676	76.716
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>81.425.363</u>	<u>77.044.824</u>
JUMLAH ASET		<u>96.534.197</u>	<u>91.369.486</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha	2c,2q,15,44,53		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.489.864	1.230.129
Pihak ketiga		6.371.012	8.911.854
Hutang lain-lain		27.196	23.127
Hutang pajak	2s,38	1.800.876	1.163.836
Beban yang masih harus dibayar	2c,16,34, 41,44	3.497.576	3.383.731
Pendapatan diterima di muka	2q,17	2.798.716	2.794.029
Uang muka pelanggan dan pemasok		253.764	711.724
Hutang bank jangka pendek	2c,18,44	50.405	42.612
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2l,2q, 19,44,53	7.767.893	7.142.260
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.057.302	25.403.302
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2s,38,53	3.686.817	2.974.842
Kewajiban penghargaan masa kerja	2c,2r,42,44	209.959	108.722
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja	2c,2r,43,44	1.681.512	2.553.531
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2c,2r,41,44	684.805	1.057.509
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Kewajiban sewa pembiayaan	2l,2q,10,19,53	460.883	448.965
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,19,20,44	2.878.012	3.874.738
Wesel bayar	2c,19,21,44	113.463	-
Hutang bank	2c,19,22,44	9.046.132	6.393.675
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	19,23	-	1.179.701
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		18.761.583	18.591.683
HAK MINORITAS	24	11.932.167	10.581.091

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2008
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B			
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B	1c,25	5.040.000	5.040.000
Tambahan modal disetor	2u,26	1.073.333	1.073.333
Modal saham yang diperoleh kembali -			
490.574.500 lembar saham di tahun 2010 dan 2009	2u,27	(4.264.073)	(4.264.073)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	2d,28	478.000	360.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	2f	385.595	385.595
Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	35.113	1.653
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2f	230.826	239.055
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	1d,2d	(439.444)	-
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		15.336.746	10.557.985
Belum ditentukan penggunaannya		23.907.049	23.399.862
Jumlah Ekuitas		<u>41.783.145</u>	<u>36.793.410</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>96.534.197</u>	<u>91.369.486</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (UNAUDITED)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS)**

	Catatan	2010	2009
PENDAPATAN USAHA			
Telepon	2q,29,53		
Tidak bergerak		3.342.087	3.583.266
Seluler		6.691.220	6.499.363
Interkoneksi	2c,2q,30,44,53	1.016.657	1.091.924
Data, internet, dan jasa teknologi informatika	2q,31,53	4.994.750	4.006.899
Jaringan	2c,2q,32,44	277.470	263.470
Jasa telekomunikasi lainnya	2m, 2q, 11,33,46	265.138	173.383
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>16.587.322</u>	<u>15.618.305</u>
BEBAN USAHA			
Penyusutan	2k,2l,2m, 10,11,12	3.354.760	2.964.718
Karyawan	2c,2r,16,34, 41,42,43,44	1.874.100	1.904.766
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi Umum dan administrasi	2c,2q,35,44,53 2g,2h,2q,5, 6,13,36	3.966.357	3.460.928
Interkoneksi	2c,2q,37,44	670.220	743.834
Pemasaran	2q	416.459	414.604
Jumlah Beban Usaha		<u>11.265.565</u>	<u>10.330.107</u>
LABA USAHA		5.321.757	5.288.198
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga	2c,44	79.674	138.451
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	2f,9	437	931
Beban bunga	2c,44	(504.235)	(517.388)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2p	164.054	(211.718)
Lain-lain - bersih		77.261	56.371
Beban lain-lain - bersih		<u>(182.809)</u>	<u>(533.353)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		5.138.948	4.754.845
(BEBAN) MANFAAT PAJAK			
Pajak kini	2s,38	(1.036.459)	(1.405.610)
Pajak tangguhan		(335.920)	6.747
		<u>(1.372.379)</u>	<u>(1.398.863)</u>
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		3.766.569	3.355.982
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI - bersih	24	(989.979)	(898.098)
LABA BERSIH		2.776.590	2.457.884
LABA PER SAHAM DASAR			
Laba bersih per saham	2w,39	141,16	124,46
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)		5.646,40	4.978,40

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (UNAUDITED)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**

31 MARET 2010 DAN 2009

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sependengali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	Saldo laba		Jumlah ekuitas
										Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 1 Januari 2010		5.040.000	1.073.333	(4.264.073)	478.000	385.595	18.136	230.995	(439.444)	15.336.746	21.130.459	38.989.747
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	-	-	-	-	-	16.977	-	-	-	-	16.977
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi	2f,9	-	-	-	-	-	-	(169)	-	-	-	(169)
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776.590	2.776.590
Saldo, 31 Maret 2010		5.040.000	1.073.333	(4.264.073)	478.000	385.595	35.113	230.826	(439.444)	15.336.746	23.907.049	41.783.145

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo laba		Jumlah ekuitas
									Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 1 Januari 2009		5.040.000	1.073.333	(4.264.073)	360.000	385.595	(19.066)	238.319	10.557.985	20.941.978	34.314.071
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	-	-	-	-	-	20.719	-	-	-	20.719
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan	1d, 2b	-	-	-	-	-	-	736	-	-	736
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	2.457.884	2.457.884
Saldo, 31 Maret 2009		5.040.000	1.073.333	(4.264.073)	360.000	385.595	1.653	239.055	10.557.985	23.399.862	36.793.410

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (UNAUDITED)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

	2010	2009
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan kas dari pendapatan usaha		
Telepon		
Tidak bergerak	3.134.821	3.584.082
Seluler	6.619.502	6.591.725
Interkoneksi - bersih	1.081.317	852.809
Data, internet, dan jasa teknologi informatika	4.795.259	3.808.882
Jasa lainnya	535.301	455.429
	<hr/>	<hr/>
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan usaha	16.166.200	15.292.927
Pembayaran kas untuk beban usaha	(8.310.521)	(7.222.995)
Pengembalian kas kepada pelanggan	143.852	569.313
	<hr/>	<hr/>
Kas yang dihasilkan dari operasi	7.999.531	8.639.245
	<hr/>	<hr/>
Penerimaan bunga	87.614	151.759
Pembayaran bunga	(439.121)	(571.434)
Pembayaran pajak penghasilan	(662.922)	(966.307)
	<hr/>	<hr/>
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	6.985.102	7.253.263
	<hr/>	<hr/>
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Hasil dari penjualan penyertaan sementara dan pencairan deposito berjangka yang jatuh tempo	23.236	4.242
Pembelian penyertaan sementara dan penempatan deposito berjangka	(5.660)	(4.036)
Hasil dari penjualan aset tetap	1.451	844
Pembelian aset tetap	(4.361.856)	(5.031.228)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(647.912)	(917.871)
Penurunan (kenaikan) uang muka, aset lainnya, dan rekening escrow	144.812	(34.162)
Kas bersih dibayar dari transaksi penggabungan usaha	(111.676)	-
Pembelian aset tidak berwujud	(19.342)	(2.013)
Penerimaan dividen kas	-	863
Pembelian penyertaan jangka panjang	(3.905)	-
	<hr/>	<hr/>
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi	(4.980.852)	(5.983.361)
	<hr/>	<hr/>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas anak perusahaan	(405.585)	-
Hasil dari pinjaman jangka pendek	21.483	5.713
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(14.928)	(13.500)
Hasil wesel jangka menengah	35.000	-
Hasil dari pinjaman jangka panjang	422.565	304.399
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(2.623.094)	(1.889.197)
Pembayaran wesel bayar	-	(123.927)
Pembayaran hutang sewa pembiayaan	(77.110)	(59.747)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(2.641.669)	(1.776.259)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(637.419)	(506.357)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(416.982)	126.116
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	7.805.460	6.889.945
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>6.751.059</u>	<u>6.509.704</u>
 INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS		
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Akuisisi aset tetap yang dibiayai dengan hutang usaha	5.703.508	6.988.865
Akuisisi aset tetap melalui sewa pembiayaan	5.967	82.001

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “*Post en Telegraafdienst*”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (“BAPEPAM-LK”) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU.46312.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20155.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

- i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- iv. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebuah perusahaan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia ("MPPT") melalui dua surat keputusan yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri.

Kegiatan Perusahaan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, meliputi telepon, telex, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan seluler. Pada tahun 1995, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra usaha dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional ("Divre") melalui pola Kerja Sama Operasi ("KSO"), dalam rangka:

- (1) mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi,
- (2) menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, dan
- (3) meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya.

Pada mulanya, Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (*local wireline* dan *fixed wireless*) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri ("SLJJ") untuk jangka waktu minimum 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya.

Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menerbitkan Undang-Undang No. 36 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi meliputi:

- (1) Jaringan telekomunikasi,
- (2) Jasa telekomunikasi, serta
- (3) Telekomunikasi khusus.

Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Instansi Pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi ini melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan dapat membuka jalan menuju liberalisasi pasar. Sehubungan dengan Undang-Undang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”) No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan SLJJ telah dipersingkat masing-masing dari masa berakhir periode pada Desember 2010 menjadi Agustus 2002 dan dari Desember 2005 menjadi Agustus 2003. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan (Catatan 12 dan 28). Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan SLJJ. Pada tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Indosat”) diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ.

Perusahaan telah memperoleh izin komersial untuk menyelenggarakan jasa Sambungan Langsung Internasional (“SLI”) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (“Menhub”) No. KP. 162 tahun 2004 pada tanggal 13 Mei 2004.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 27 tanggal 15 Juli 2008 oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M.; (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 16 tanggal 19 September 2008 oleh notaris yang sama; dan (iii) RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 22 tanggal 12 Juni 2009 oleh notaris yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Komisaris Utama	Tanri Abeng	Tanri Abeng
Komisaris	Bobby A.A Nazief	Bobby A.A Nazief
Komisaris	Mahmuddin Yasin	Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	Arif Arryman	Arif Arryman
Komisaris Independen	Petrus Sartono	Petrus Sartono
Direktur Utama	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Wakil Direktur Utama/ <i>Chief Operating Officer</i> (“COO”)	* (lihat Catatan di bawah)	* (lihat Catatan di bawah)
Direktur Keuangan	Sudiro Asno	Sudiro Asno
Direktur Jaringan dan Solusi	Ermady Dahlan	Ermady Dahlan
Direktur <i>Enterprise</i> dan <i>Wholesale</i>	Arief Yahya	Arief Yahya
Direktur Konsumer	I Nyoman Gede Wiryanata	I Nyoman Gede Wiryanata
Direktur <i>Compliance</i> dan <i>Risk Management</i>	Prasetio	Prasetio
Direktur Teknologi Informasi	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur <i>Human Capital</i> dan <i>General Affairs</i> (“HCGA”)	Faisal Syam	Faisal Syam

*COO dirangkap oleh Direktur Jaringan dan Solusi di tahun 2009 dan 2008

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan (lanjutan)

1. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. 125/SRT/DK/2008/RHS tanggal 25 Juli 2008, Dewan Komisaris setuju untuk melakukannya penunjukkan COO, di samping tugas dalam jabatannya sebagai Direktur Jaringan dan Solusi.

Berdasarkan RUPSLB Perusahaan, pada tanggal 19 September 2008, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk mengangkat Bobby A.A. Nazief sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan untuk memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPSLB pada tanggal 10 Maret 2004, yang seharusnya berakhir pada tanggal 10 Maret 2009 menjadi berakhir pada tanggal RUPST Perusahaan 2009. Berdasarkan RUPST Perusahaan, pada tanggal 12 Juni 2009, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk memperpanjang masa jabatan Tanri Abeng, Arif Arryman, dan Petrus Sartono sampai dengan RUPSLB Perusahaan berikutnya.

2. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan per tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing adalah 27.366 orang dan 30.288 orang .

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana ("*Initial Public Offering*" atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO, dan selanjutnya didaftarkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, dan III untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Maret 2010, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 43.468.176 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE (Catatan 25).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas (Catatan 2b dan 2d):

(i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung:

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2010	2009	2010	2009
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi <i>Global System for Mobile Communication</i> ("GSM")/26 Mei 1995	1995	65	65	58.616.876	52.945.199
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa telekomunikasi multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	1.715.491	837.616
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TI") (dahulu PT Aria West International ("AWI")), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	1.435.377	659.251
PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.167.074	1.146.543
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100 (termasuk melalui 49% kepemilikan oleh Metra)	51	611.897	578.689
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	376.397	411.503
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa"), Jakarta, Indonesia	TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997	1997	100 (termasuk melalui 1,25% kepemilikan oleh Metra)	100 (termasuk melalui 1,25% kepemilikan oleh Metra)	196.844	131.318

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung: (lanjutan)

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2010	2009	2010	2009
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	188.214	170.329
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network Access Point (NAP)</i> , <i>Voice Over Data (VOD)</i> , dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	4.910	4.910

(ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung:

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2010	2009	2010	2009
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi dan peranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	80 (melalui 80% kepemilikan oleh Metra)	80 (melalui 80% kepemilikan oleh Metra)	467.606	353.593
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	175.776	98.225
PT Balebat Dedikasi Prima ("Balebat"), Bogor, Indonesia	Percetakan/ 1 Oktober 2003	2000	65 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)	33,15 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)	81.695	93.490
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Data dan komunikasi perbankan/ 31 Oktober 2005	2006	60 (melalui 60% kepemilikan oleh Metra)	60 (melalui 60% kepemilikan oleh Metra)	68.843	24.676
PT Administrasi Medika ("Ad-Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2010	75 melalui 75% kepemilikan oleh Metra)	-	45.503	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(ii) *Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung:* (lanjutan)

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2010	2009	2010	2009
Telkomsel Finance B.V., ("TFBV"), Amsterdam, The Netherlands	Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjam, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen hutang/ 7 Februari 2005	2005	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	8.184	10.638
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100 melalui 100% kepemilikan oleh Metra)	-	18.422	-
Aria West International Finance B.V. ("AWI BV"), The Netherlands	Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996	1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	561	1.642
Telekomunikasi Selular Finance Limited ("TSFL"), Mauritius	Keuangan - didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham <i>debenture</i> , obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002	2002	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	23	30

(a) *Telkomsel*

Pada tanggal 14 Februari 2006, Telkomsel mendapatkan lisensi *International Mobile Telecommunications-2000* ("IMT-2000") atau *3rd Generation Technology* ("3G") pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz ("GHz") untuk periode 10 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006. Lisensi dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi (Catatan 13 dan 48c.i). Penyediaan layanan 3G secara komersial telah dimulai sejak September 2006.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, lisensi operasi Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 Megahertz ("MHz") dan 1800 MHz; (ii) Layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) Layanan telekomunikasi dasar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(a) Telkomsel (lanjutan)

Lisensi tersebut di atas mengatur tentang hak dan kewajiban Telkomsel, termasuk sanksi-sanksi yang relevan. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi secara tahunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 213/DIRJEN//2008 tanggal 4 Agustus 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Depkominfo") melalui DJPT memberikan Telkomsel izin prinsip untuk menyediakan Jasa Teleponi Internet (*Voice over Internet Protocol* atau "VoIP"), dengan masa berlaku satu tahun bergantung pada uji layak operasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 226/DIRJEN/2009 tanggal 24 September 2009, Telkomsel mendapatkan lisensi operasi untuk menyediakan jasa VoIP di beberapa daerah. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi setiap tahun atau setiap lima tahun.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia ("BI") No. 10/632/DASP tanggal 12 Agustus 2008, pada tanggal 12 Agustus 2008 Telkomsel terdaftar sebagai penyedia jasa pengiriman uang dengan nomor registrasi 10/12/DASP/10 untuk menyediakan jasa pengiriman uang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tanggal 1 September 2009, Pemerintah memberikan Telkomsel tambahan lisensi IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz ("GHz") untuk periode 10 tahun sejak tanggal surat keputusan (Catatan 13iii dan 48c.i).

(b) Metra

Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 23 Maret 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 64 tanggal 16 April 2009, para pemegang saham Metra menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp418.850 juta menjadi Rp485.679 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut Rp34.829 juta disetor dengan cara konversi dari piutang Perusahaan kepada Metra. Selain itu, para pemegang saham Metra juga menyetujui pendirian anak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa portal multimedia dan konten.

Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 24 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Wahyu Nurani, S.H. No. 8 tanggal 24 Juli 2009, para pemegang saham Metra menyetujui: (1) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp1.000.000 juta menjadi Rp2.000.000 juta yang terbagi atas 200.000.000 lembar saham, dan (2) penambahan modal ditempatkan dari Rp485.679 juta menjadi Rp1.084.179 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2009, berdasarkan akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, Metra telah menandatangani Akta Jual Beli ("AJB") Saham untuk melakukan pembelian 205.800.000 lembar saham Infomedia atau 49% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp598.000 juta dari Elnusa. Pada tanggal 1 Juli 2009, Metra melakukan pembayaran nilai transaksi untuk pembelian 49% saham Infomedia dari Elnusa sebesar Rp598.000 juta (Catatan 1d.e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(b) Metra (lanjutan)

Pada tanggal transaksi, Perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas Infomedia, sehingga transaksi ini merupakan akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai kepemilikan minoritas sebesar Rp439.444 juta dan dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan" pada akun ekuitas (Catatan 2d).

Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham Administrasi Medika ("Ad Medika") untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani *Sales Purchase Agreement* (SPA) dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut sebesar Rp128.250 juta.

(c) TII

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan menyetujui penyesuaian atas pengalihan bisnis telekomunikasi internasional dari Perusahaan kepada TII menjadi pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional berupa pola kemitraan jasa pelaksana pelayanan, sesuai dengan hasil Amandemen Ketiga Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan TII No. K.Tel.665/HK.820/UTA-00/2008 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Internasional.

Pada tanggal 1 Juni 2009, berdasarkan Amandemen Ketiga dan Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan & Pemasangan Proyek Batam Singapore Cable System ("BSCS"), Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Proyek BSCS kepada TII.

Pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan *Notice of Assignment Acceptance* kepada Komite Manajemen Asia America Gateway ("AAG") dan anggota konsorsium AAG, Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam konsorsium AAG kepada TII.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui pengakuan hutang yang timbul dari pengalihan proyek pembangunan infrastruktur internasional (*on going project*) Perusahaan kepada TII yang terdiri dari proyek BSCS dan AAG sebesar Rp463.105 juta.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarajah, S.H. No. 12 tanggal 21 Januari 2010, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Perjanjian Pengakuan Hutang dan Konversi Hutang Menjadi Penyertaan Saham antara Perusahaan dan TII pada tanggal 23 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui: (1) penambahan modal ditempatkan sebesar Rp593.191 juta dengan mengeluarkan 5.203.427 saham baru; (2) pengeluaran keseluruhan saham baru yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan melalui konversi hutang menjadi penambahan modal disetor (*debt to equity swap*) sebesar Rp463.105 juta dan setoran tunai sebesar Rp130.086 juta; (3) peningkatan modal dasar dari Rp308.306 juta yang terbagi atas 2.704.440 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000 menjadi Rp2.052.000 juta yang terbagi atas 18.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000.

Pada tanggal 28 Desember 2009, Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk peningkatan modal kepada TII sebesar Rp130.086 juta.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(c) *TII* (lanjutan)

Pada tanggal 23 Desember 2009, Perusahaan menyetujui penghapusan Pendapatan Minimum Telkom ("*Minimum Telkom Revenue*" atau "MTR") dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi ("*Distributable KSO Revenues*" atau "DKSOR"). Di samping itu proporsi pembagian pendapatan yang semula bagian TII adalah sebesar 70% dari DKSOR menjadi proporsional sebesar beban penyusutan atas aset TII yang dioperasikan di Divre III, berdasarkan hasil Amandemen Keempat atas Perjanjian KSO Telkom Divre III dengan TII No. K.Tel.222/HK.810/UTA-00/1995 tanggal 20 Oktober 1995. Amandemen ini berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai tanggal pengakhiran KSO pada 31 Desember 2010.

Pada tanggal 11 Januari 2010, para pemegang saham TII menyetujui keikutsertaan TII dalam konsorsium Kabel Laut *South East Asia-Japan Cable System* (SJC) dan *extended capacity* ke Amerika Serikat dengan total investasi sebesar US\$45,2 juta

(d) *Pramindo*

Pada tanggal 7 Juli 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32154.AH.01.02 tahun 2009 kepada Pramindo tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan perubahan penetapan kedudukan Pramindo yang semula berada di Medan menjadi di Jakarta.

(e) *Infomedia*

Berdasarkan RUPS Sirkuler Infomedia pada tanggal 5 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 10 tanggal 5 Juni 2009, para pemegang saham Infomedia menyetujui: (1) kapitalisasi bagian saldo laba ditahan perseroan dalam bentuk pembagian dividen saham; (2) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp100.000 juta menjadi Rp500.000 juta yang terbagi atas 1.000.000.000 lembar saham; dan (3) peningkatan modal disetor perseroan dari Rp40.000 juta menjadi Rp210.000 juta yang terbagi atas 420.000.000 lembar saham.

Berdasarkan AJB Saham antara Elnusa dan Metra pada tanggal 30 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, para pihak menyetujui pemindahan hak atas saham milik Elnusa sejumlah 205.800.000 lembar saham kepada Metra (Catatan 1d.b).

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 29 April 2010.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ("GAAP Indonesia").

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal pelepasannya.

Seluruh saldo dan transaksi antar-perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 7, mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

d. Akuisisi anak perusahaan

Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan metode pembelian. Harga perolehan akuisisi dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban yang teridentifikasi dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai *goodwill*, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun, periode yang lebih panjang dari lima tahun diperkenankan apabila tidak lebih dari dua puluh tahun.

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tidak berwujud dan *goodwill*, atau adanya indikasi penurunan nilai ("*impairment*"). Jika terdapat indikasi *impairment*, nilai aset tidak berwujud dan *goodwill* yang dapat terpulihkan (*recoverable*) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik dari aset terkait.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Akuisisi anak perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Juli 2004, Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“DSAK”) mengeluarkan PSAK 38 (Revisi 2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” (“PSAK 38R”). Berdasarkan PSAK 38R, akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode penyatuan kepemilikan (*carryover basis*). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan (“PPH”) yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” pada bagian ekuitas.

Saldo “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian ketika tidak terdapat lagi hubungan sepengendali antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Selisih yang timbul dari jumlah bayar dengan nilai tercatat hak minoritas yang didebitkan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan” (Catatan 1d.b).

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

f. Penyertaan

i. Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai penyertaan sementara.

ii. Penyertaan pada efek

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui pada laporan laba rugi periode berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan menjamin kewajiban perusahaan asosiasi atau mempunyai komitmen untuk menyediakan dukungan keuangan kepada perusahaan asosiasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan (lanjutan)

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi (lanjutan)

Secara berkesinambungan, sekurang-kurangnya di setiap akhir tahun, Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan, lamanya nilai wajar perusahaan berada di bawah nilai tercatat penyertaan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai terendah antara harga pasar (jika ada) dan nilai diskonto arus kas, atau teknik penilaian lain yang tepat.

Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun "Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi". Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian saat penyertaan dijual sesuai persentase kepemilikan yang dijual.

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN") dan PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S."). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" dalam bagian ekuitas.

iv. Penyertaan lainnya

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan hanya disesuaikan untuk penurunan nilai yang bersifat non-temporer atas setiap penyertaan. Penurunan nilai tersebut langsung dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan dan anak perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Beban penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan dan anak perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil.

h. Persediaan

Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan dan anak perusahaan telah mengadopsi PSAK 14 (Revisi 2008) "Persediaan", yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif.

Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), kartu *Removable User Identity Module* ("RUIM"), dan vauzer Prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, dan vauzer Prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang berasal dari akuisisi anak perusahaan/bisnis, lisensi, dan peranti lunak komputer. Aset tidak berwujud diakui jika Perusahaan dan anak perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tidak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan anak perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tidak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (Catatan 13.iii). Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan ("BHP") selama sepuluh tahun (Catatan 48c.i). Uang muka (*up-front fee*) dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai pada tahun 2006, sejak aset terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan interpretasi manajemen terhadap ketentuan lisensi tersebut dan konfirmasi tertulis dari DJPT, lisensi tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa iuran tahunan BHP. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui iuran tahunan BHP sebagai beban pada saat terjadinya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan lisensi tersebut setiap tahun.

k. Aset tetap - perolehan langsung

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nilai residu dan masa manfaat aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku.

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Prasarana bangunan	3-7
Peralatan sentral telepon	5-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	5-20
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-15
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-10
Peralatan pengolahan data	3-10
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	5-8
Peralatan lainnya	5

Terkait dengan PSAK 16R, sejak 1 Januari 2008, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat serat optik (merupakan bagian dari jaringan kabel) dari 15 tahun menjadi 25 tahun. Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 oleh karena dianggap tidak material.

Perusahaan dan anak perusahaan secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Peranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan peranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, peranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari peranti keras komputer. Jika peranti lunak komputer berdiri sendiri dari peranti keras komputernya, peranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset tidak berwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan sampai dengan aset siap digunakan atau dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

l. Aset tetap sewa pembiayaan

Sejak 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007) "Sewa" ("PSAK 30R"), yang efektif berlaku untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008.

Berdasarkan PSAK 30R, klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007)", mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30R secara retrospektif terhadap semua transaksi sewa sejak tanggal mulainya perjanjian terkait atau secara prospektif seolah-olah PSAK 30R berlaku sejak awal periode pelaporan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penerapan prospektif. Efek kumulatif dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 karena dampak dari penerapan standar tersebut terhadap tahun-tahun sebelumnya tidak signifikan.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban pada neraca sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat ekonomisnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perjanjian Pola Bagi Hasil ("PBH")

Pencatatan transaksi PBH sebelumnya dilakukan dengan mengakui "Aset tetap PBH" dengan mengkredit akun "Pendapatan PBH ditangguhkan" yang disajikan pada bagian kewajiban di neraca konsolidasian sebesar biaya yang dikeluarkan mitra usaha, sebagaimana disetujui dalam perjanjian antara Perusahaan dan mitra usaha. Dengan pencabutan PSAK 35 (Catatan 2q.viii), transaksi PBH dicatat dengan mengacu kepada PSAK 30 (revisi 2007). Akun "Kewajiban sewa pembiayaan PBH" diakui sebagai pengganti akun "Pendapatan PBH ditangguhkan" sebesar estimasi nilai kini pembayaran kepada mitra PBH.

Aset tetap PBH disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset dengan menggunakan metode garis lurus (Catatan 2k). Pada akhir masa bagi hasil, aset tetap PBH yang bersangkutan direklasifikasi ke akun "Aset tetap".

Semua pendapatan yang dihasilkan dari PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara sebagian dari pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan disajikan sebagai pengurang atas kewajiban PBH.

n. Kerja Sama Operasi ("KSO")

Pendapatan dari KSO mencakup amortisasi pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom ("*Minimum Telkom Revenue*" atau "MTR") dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi ("*Distributable KSO Revenues*" atau "DKSOR").

Kompensasi yang diterima dari mitra KSO dicatat sebagai pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996.

MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk periode berjalan.

Bagian Perusahaan atas DKSOR diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, setelah dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO, sesuai dengan perjanjian KSO.

Berdasarkan PSAK 39, "Akuntansi Kerja Sama Operasi" yang menggantikan paragraf 14 PSAK 35, "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi", aset yang dibangun oleh mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

o. Beban tangguhan - hak atas tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca konsolidasian, aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal neraca konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	Perusahaan dan anak perusahaan			
	2010		2009	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat ("US\$") 1	9.088	9.099	11.535	11.575
Euro1	12.231	12.248	15.307	15.364
Yen1	97,41	97,58	117,33	117,81

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

q. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemasangan sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan selesai dan siap dipakai. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan jasa penyambungan, penggunaan, dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan jasa penyambungan diakui pada saat penyambungan terjadi.
- Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel (lanjutan)

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

- Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.
- Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.
- Potongan promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

Pendapatan dalam rangka *Universal Service Obligation* atau Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU") diakui saat akses telekomunikasi siap dan jasa tersebut diserahkan.

iii. Pendapatan interkoneksi

Dengan pencabutan ketentuan pengakuan pendapatan interkoneksi dalam PSAK 35 (Catatan 2q.viii) maka pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya berdasarkan perjanjian. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan operator Perusahaan (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Perusahaan (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari pemasangan (*set-up*) internet, komunikasi data, dan *e-Business* diakui pada saat pemasangan selesai. Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi peranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan peranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkuit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya. Pendapatan diakui pada saat jasa diterima atau barang diserahkan kepada pelanggan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vii. Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

viii. Penerapan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (“PPSAK”) 1

Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PPSAK 1, “Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol” yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun pada laporan keuangan untuk periode yang berakhir sebelum periode sajian (Catatan 53). PPSAK 1 menghapus ketentuan yang ada pada PSAK 35 “Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi” yang berdampak pada beberapa hal penting dalam laporan keuangan, antara lain, pengungkapan pendapatan interkoneksi yang kini harus disajikan secara *gross* dan penghapusan ketentuan pengakuan pendapatan yang ditangguhkan yang diakibatkan oleh pengakuan aset tetap *pola bagi hasil (PBH)* sehingga kini diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

r. Imbalan kerja

i. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pensiun setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuarial yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban yang bersangkutan.

Laba atau rugi aktuarial yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting*.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk tahun iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Penghargaan masa kerja ("Long Service Awards" atau "LSA") dan cuti masa kerja ("Long Service Leave" atau "LSL")

Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Laba atau rugi aktuarial yang muncul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuarial, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

iii. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk memberi imbalan Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk melakukan Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana Pendi formal yang tidak dapat dibatalkan.

iv. Masa persiapan pensiun ("MPP")

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

v. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (“PPh”)

Perusahaan dan anak perusahaan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer aset dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun dimana perbedaan temporer tersebut terpulihkan atau direalisasi.

PPh dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, misalnya selisih nilai transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali dan efek penyesuaian penjabaran mata uang asing untuk penyertaan tertentu di perusahaan asosiasi, dalam hal mana PPh-nya juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diharapkan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan saling hapus di neraca, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

t. Instrumen derivatif

Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai. Dengan penerbitan PPSAK 5 “Pencabutan ISAK 6: Interpretasi atas Paragraf 12 Dan 16, PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Mata Uang Asing” maka instrumen derivatif melekat diukur dan diakui berdasarkan PSAK 55 (revisi 2006), Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak pencabutan ISAK 6 terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, aset atau kewajiban terkait harus disesuaikan nilainya. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui pada laporan laba rugi konsolidasian atau laporan perubahan ekuitas konsolidasian tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari transaksi lindung nilai tersebut.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai "Tambahkan Modal Disetor".

v. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

w. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS.

x. Informasi segmen

Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (*distinguishable unit*) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di Perusahaan.

y. Penggunaan taksiran

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud, penyisihan untuk piutang, dan kewajiban yang berhubungan dengan imbalan karyawan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut. Dalam menentukan beberapa taksiran, manajemen menggunakan tenaga ahli pihak ketiga sebagaimana dipersyaratkan. Dalam menggunakan tenaga ahli untuk membantu dengan model dan perhitungan, manajemen mereview asumsi dasar dan menilai perhitungan yang terkait kewajaran dalam konteks keadaan Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. AKUISISI SIGMA DAN AD MEDIKA

a. Akuisisi Sigma

Pada tanggal 21 Februari 2008, Metra dan para pemegang saham Sigma, PT Sigma Citra Harmoni ("SCH") dan Trozenin Management Plc menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Saham dimana Metra mengakuisisi 80% saham Sigma dengan harga perolehan sebesar US\$35,2 juta atau setara dengan Rp331.052 juta yang berlaku efektif pada tanggal 22 Februari 2008 ("tanggal penutupan") (Catatan 1d.b).

Sigma adalah perusahaan jasa teknologi informatika yang menyediakan peranti lunak untuk perusahaan perbankan, *multi finance*, dan manufaktur. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk memperluas jasanya pada industri-industri sejenis terutama jasa teknologi informatika dengan menggabungkan pengalaman Sigma dan basis konsumen korporasi Perusahaan. Goodwill dalam kaitannya dengan akuisisi ini terdiri terutama dari nilai wajar dari keahlian dan pengalaman dari tenaga kerja perusahaan yang diakuisisi.

Metra dan SCH setuju untuk mendukung Sigma melakukan IPO dalam periode 24 bulan dari tanggal penutupan. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, SCH sebagai pemegang 20% saham Sigma, mempunyai opsi jual (*put option*) yang mengharuskan Metra membeli saham minoritas. Harga beli opsi tersebut yaitu nilai tertinggi antara harga per saham yang diperjualbelikan yang disesuaikan dengan tingkat bunga dan nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen.

Akuisisi Sigma dicatat dengan menggunakan metode pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

	<u>Rp</u>
Aset dan kewajiban yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut:	
Aset lancar	150.461
Aset tetap	86.886
Aset tidak lancar lainnya	29.686
Aset tidak berwujud	189.405
Kewajiban jangka pendek	(75.347)
Kewajiban jangka panjang	(37.570)
Kewajiban pajak tangguhan	(54.636)
Hak minoritas	(57.777)
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	231.108
<i>Goodwill</i>	99.944
Jumlah harga perolehan	331.052
Dikurangi:	
Kas dan setara kas pada anak perusahaan yang diakuisisi	(43.649)
Arus kas keluar akibat akuisisi	287.403

Metra memperoleh kendali atas Sigma pada tanggal 22 Februari 2008 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo 28 Februari 2008, sebagai tanggal neraca terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Sigma terhitung sejak 1 Maret 2008. Aset tidak berwujud merupakan kontrak dan hubungan jangka panjang dengan konsumen, peranti lunak, dan merek dagang (Catatan 13).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. AKUISISI SIGMA DAN AD MEDIKA (lanjutan)

b. Akuisisi Ad Medika

Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham Administrasi Medika ("Ad Medika") untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani *Sales Purchase Agreement* (SPA) dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut sebesar Rp128.250 juta.

Ad Medika adalah perusahaan yang bergerak di bidang *electronic health care network*. Ad Medika merupakan perusahaan pengelola administrasi layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk mewujudkan *insure net* sebagai cikal bakal program *e-health* nasional.

Akuisisi Admedika dicatat dengan menggunakan metode pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Alokasi harga perolehan sementara adalah sebagai berikut:

	<u>Rp</u>
Aset dan kewajiban yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut:	
Aset lancar	25.871
Aset tetap	17.080
Aset tidak lancar lainnya	3.261
Aset tidak berwujud	23.278
Kewajiban jangka pendek	(21.674)
Kewajiban jangka panjang	(8.695)
Kewajiban pajak tangguhan	(4.973)
Hak minoritas	(9.250)
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	<u>24.898</u>
<i>Goodwill</i>	<u>103.352</u>
Jumlah harga perolehan	128.250
Dikurangi:	
Kas dan setara kas pada anak perusahaan yang diakuisisi	<u>(13.574)</u>
Arus kas keluar akibat akuisisi	<u>114.676</u>

Metra memperoleh kendali atas Admedika pada tanggal 25 Februari 2010 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo 28 Februari 2010, sebagai tanggal neraca terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Admedika terhitung sejak 1 Maret 2010. Aset tidak berwujud merupakan kontrak dan hubungan jangka panjang dengan konsumen dan merek dagang (Catatan 13).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2010	2009
Kas	28.452	34.666
Bank		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	408.627	161.801
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	219.874	383.120
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	39.675	80.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	898	18
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	62	-
PT Bank Pos Nusantara	-	105
	<u>669.136</u>	<u>625.648</u>
Mata uang asing		
Bank Mandiri	178.424	215.144
BNI	40.058	29.454
BRI	212	653
BSM	108	-
	<u>218.802</u>	<u>245.251</u>
Sub-jumlah	<u>887.938</u>	<u>870.899</u>
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deutsche Bank AG ("DB")	222.289	8.486
ABN AMRO Bank ("AAB")	86.765	85.544
PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")	12.550	85
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	12.018	11.459
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("Bank Ekonomi")	7.647	2.296
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	7.136	2.200
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	2.274	4.834
Citibank, N.A. ("Citibank")	1.230	315
Bank Syariah Mega	-	3.846
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	2.751	2.153
	<u>354.660</u>	<u>121.218</u>
Mata uang asing		
Deutsche Bank AG ("DB")	32.484	11.732
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	29.945	1.717
Bank Ekonomi	12.325	5.935
Citibank, N.A. ("Citibank")	8.561	8.807
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.348	1.273
	<u>84.663</u>	<u>29.464</u>
Sub-jumlah	<u>439.323</u>	<u>150.682</u>
Jumlah bank	<u>1.327.261</u>	<u>1.021.581</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2010	2009
Deposito berjangka		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah		
BNI	1.665.749	483.448
BRI	808.150	520.915
Bank Mandiri	338.867	555.831
BTN	90.000	375.725
BSM	3.000	-
	<u>2.905.766</u>	<u>1.935.919</u>
Mata uang asing		
BNI	699.719	1.283.308
BRI	491.931	176.486
Bank Mandiri	-	2.311
	<u>1.191.650</u>	<u>1.462.105</u>
Sub-jumlah	<u>4.097.416</u>	<u>3.398.024</u>
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("Bank Jabar")	335.560	345.560
Bank Bukopin	159.590	184.895
PT Bank Muamalat Indonesia	102.000	78.550
Bank CIMB Niaga	100.117	6.600
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	75.000	105.000
BCA	57.172	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	24.000	5.000
PT Pan Indonesia Bank Tbk	20.000	5.000
Deutsche Bank AG ("DB")	15.000	31.670
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	10.000	69.315
PT Bank Syariah Mega Indonesia ("Bank Syariah Mega")	3.500	-
PT Bank Yudha Bhakti	2.000	2.019
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.000	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")	-	60.000
PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk)	-	40.000
	<u>904.939</u>	<u>933.609</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2010	2009
Deposito berjangka (lanjutan)		
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
BCA	392.082	542.091
Bank Bukopin	909	-
Standard Chartered Bank ("SCB")	-	541.662
Bank Muamalat	-	34.605
Bank CIMB Niaga	-	3.466
	<u>392.991</u>	<u>1.121.824</u>
Sub-jumlah	<u>1.297.930</u>	<u>2.055.433</u>
Jumlah deposito berjangka	<u>5.395.346</u>	<u>5.453.457</u>
Jumlah	<u>6.751.059</u>	<u>6.509.704</u>

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Rupiah	4% - 13,5%	6,25% -13,50%
Mata uang asing	0,05% - 4,75%	0,25% - 4,75%

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan non-*retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2010	2009
Instansi Pemerintah	798.635	752.242
CSM	54.411	46.908
Indosat	67.572	49.084
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")	15.783	-
PT Applikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	3.271	12.088
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	4.597	4.254
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	3.373	1.145
PSN	4.212	7.286
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	5.927	11.561
Jumlah	957.781	884.568
Penyisihan piutang ragu-ragu	(108.600)	(114.447)
Jumlah bersih	849.181	770.121

Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(ii) Pihak ketiga

	2010	2009
Pelanggan individual dan bisnis	4.175.609	3.738.103
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	394.878	440.181
Jumlah	4.570.487	4.178.284
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.307.314)	(1.174.383)
Jumlah bersih	3.263.173	3.003.901

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2010	2009
Sampai dengan 6 bulan	684.110	803.900
7 sampai dengan 12 bulan	100.078	33.326
Lebih dari 12 bulan	173.593	47.342
Jumlah	957.781	884.568
Penyisihan piutang ragu-ragu	(108.600)	(114.447)
Jumlah bersih	849.181	770.121

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(ii) Pihak ketiga

	2010	2009
Sampai dengan 3 bulan	3.149.289	2.120.094
Lebih dari 3 bulan	1.421.198	2.058.190
Jumlah	4.570.487	4.178.284
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.307.314)	(1.174.383)
Jumlah bersih	3.263.173	3.003.901

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2010	2009
Rupiah	935.843	857.535
Dolar A.S.	21.006	27.033
Euro	932	-
Jumlah	957.781	884.568
Penyisihan piutang ragu-ragu	(108.600)	(114.447)
Jumlah bersih	849.181	770.121

(ii) Pihak ketiga

	2010	2009
Rupiah	3.936.684	3.411.931
Dolar A.S.	633.803	766.353
Jumlah	4.570.487	4.178.284
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.307.314)	(1.174.383)
Jumlah bersih	3.263.173	3.003.901

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

	2010	2009
Saldo awal	1.273.551	1.203.905
Penambahan (Catatan 36)	146.869	123.029
Penghapusbukuan piutang tak tertagih	(4.507)	(38.104)
Saldo akhir	1.415.913	1.288.830

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Kecuali untuk piutang dari Instansi Pemerintah, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mempunyai risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca konsolidasian (*off-balance sheet credit exposure*).

Piutang usaha tertentu anak perusahaan telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6. PERSEDIAAN

	2010	2009
Modul	250.783	183.629
Komponen	211.651	172.059
Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer Prabayar	117.373	206.106
Jumlah	<u>579.807</u>	<u>561.794</u>
Penyisihan persediaan usang		
Modul	(68.744)	(61.439)
Komponen	(6.770)	(6.672)
Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer Prabayar	(10)	-
Jumlah	<u>(75.524)</u>	<u>(68.111)</u>
Jumlah bersih	<u>504.283</u>	<u>493.683</u>

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal	72.175	64.849
Penambahan (Catatan 36)	3.349	3.262
Saldo akhir	<u>75.524</u>	<u>68.111</u>

Komponen dan modul terdiri dari pesawat telepon, kabel, suku cadang instalasi transmisi, dan persediaan suku cadang lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu anak perusahaan telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).

Pada 31 Maret 2010, beberapa persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebesar Rp128.367 juta (Catatan 44d.vii).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Beberapa persediaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tertentu telah diasuransikan terhadap *all industrial risks* dan risiko kehilangan pada saat pengiriman dengan total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebesar Rp10.000 juta.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Perusahaan.

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2010	2009
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 48c.iii)	1.844.747	1.212.156
Sewa	448.396	331.466
Gaji	189.893	425.027
Asuransi	20.702	79.753
Biaya penerbitan buku petunjuk telepon	2.566	2.483
Lain-lain	46.544	36.146
Jumlah	2.552.848	2.087.031

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, terdiri dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

	Mata uang	2010		2009	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BNI					
Perusahaan	Rp	-	41.937	-	20.362
	US\$	0,276	2.507	0,075	870
TII	US\$	0,569	5.167	-	-
Bank Mandiri					
Perusahaan	Rp	-	2.306	-	1.348
Metra	Rp	-	235	-	-
Infomedia	Rp	-	-	-	13.262
TII	US\$	-	-	0,569	6.559
BRI					
Metra	Rp	-	347	-	-
Bank Syariah Mega					
Dayamitra	Rp	-	-	-	800
Jumlah			52.499		43.201

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka milik Perusahaan dan anak perusahaan yang dijadikan jaminan untuk garansi bank kepada beberapa bank.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Patrakom

Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, nilai tercatat penyertaan di Patrakom sama dengan bagian Perusahaan dalam aset bersih Patrakom.

c. PSN

PSN bergerak dalam bidang penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil.

d. Scicom

Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa *call center* di Malaysia. Pada 31 Maret 2009, kontribusi TII adalah sebesar US\$3,42 juta (setara dengan Rp30.961 juta) mencerminkan 9,80% total kepemilikan TII pada Scicom.

Pada tahun 2009, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 16.081.800 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar US\$1,973 juta (setara dengan Rp18.760 juta) sehingga tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 15,86%.

Pada tanggal 3 Februari 2010, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 3.042.400 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar US\$0,42 juta (setara dengan Rp3.905 juta) sehingga tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 17,01%.

e. BMPL

BMPL (Singapore), suatu perusahaan asosiasi dari Telkomsel, bergerak dalam penyediaan jasa seluler regional di wilayah Asia Pasifik.

Pada 31 Maret 2010 dan 2009, kontribusi Telkomsel sebesar US\$2.200.000 (Rp20.360 juta) mencerminkan 10% kepemilikan.

f. BBT

BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam serta di *Bintan Beach International Resort* dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

g. Bangtelindo

Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. ASET TETAP

	1 Januari 2010	Akuisisi Ad Medika	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Maret 2010
Harga perolehan:						
Aset tetap yang diperoleh sendiri						
Tanah	781.275	7.584	5.071	-	-	793.930
Bangunan	2.978.417	5.147	22.537	-	86.338	3.092.439
Prasarana bangunan	526.770	348	20.415	-	-	547.533
Peralatan sentral telepon	28.948.306	-	48.145	-	276.471	29.272.922
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	20.716	-	-	-	-	20.716
Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	67.228.748	-	198.495	(1.015)	1.626.406	69.052.634
Jaringan kabel	23.621.586	-	206.198	(392.321)	783	23.436.246
Catu daya	7.368.721	-	30.526	(748)	49.376	7.447.875
Peralatan pengolahan data	7.602.865	-	18.215	-	110.827	7.731.907
Peralatan telekomunikasi lainnya	476.705	-	2.350	-	-	479.055
Peralatan kantor	576.098	3.167	7.465	(7.825)	422	579.327
Kendaraan	110.216	834	2.290	(226)	-	113.114
Peralatan lainnya	103.310	-	-	-	-	103.310
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	89.926	-	37.663	-	(78.278)	49.311
Prasarana bangunan	466	-	1.034	-	-	1.500
Peralatan sentral telepon	48.588	-	251.438	-	(276.471)	23.555
Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	358.562	-	1.604.867	-	(1.631.172)	332.257
Jaringan kabel	-	-	11.747	-	(11.506)	241
Catu daya	2.856	-	2.306	(40)	(33)	5.089
Peralatan pengolahan data	52.167	-	35.359	-	(47.244)	40.282
Peralatan lainnya	16.008	-	123.974	-	(103.004)	36.978
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	288.766	-	-	-	-	288.766
Peralatan pengolahan data	260.782	-	5.967	-	-	266.749
Peralatan kantor	247.897	-	-	(124.866)	-	123.031
Kendaraan	61.220	-	-	-	-	61.220
Aset customer premise equipment ("CPE")	21.778	-	-	-	-	21.778
Jumlah	148.588.128	17.080	2.644.892	(527.041)	25.485	150.748.544
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap yang diperoleh sendiri						
Bangunan	1.485.234	-	29.449	-	6.740	1.521.423
Prasarana bangunan	381.536	-	14.511	-	91	396.138
Peralatan sentral telepon	18.425.673	-	717.419	-	(7.876)	19.135.216
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	17.391	-	127	-	-	17.518
Peralatan dan instalasi transmisi Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	24.794.959	-	1.569.332	(376)	(5.704)	26.358.211
Jaringan kabel	3.136.685	-	127.015	-	(4.320)	3.259.380
Catu daya	14.688.600	-	322.571	(392.321)	(16.366)	14.602.484
Peralatan pengolahan data	2.932.127	-	237.565	(225)	547	3.170.014
Peralatan telekomunikasi lainnya	5.094.420	-	264.502	-	17.693	5.376.615
Peralatan kantor	351.875	-	3.434	-	(15)	355.294
Kendaraan	465.291	-	12.808	(7.591)	905	471.413
Peralatan lainnya	94.693	-	2.026	(226)	8	96.501
Aset CPE	87.228	-	1.293	-	(5)	88.516
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	227.193	-	5.046	-	103	232.342
Peralatan pengolahan data	116.540	-	14.127	-	1.099	131.766
Peralatan kantor	201.039	-	15.682	(124.866)	-	91.855
Kendaraan	29.133	-	4.277	-	-	33.410
Aset CPE	4.545	-	568	-	-	5.113
Jumlah	72.534.162		3.341.752	(525.605)	(7.100)	75.343.209
Nilai Buku Bersih	76.053.966					75.405.335

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2009	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Maret 2009
Harga perolehan:					
Aset tetap yang diperoleh sendiri					
Tanah	684.768	15.422	-	12.027	712.217
Bangunan	2.721.804	91.040	-	43.384	2.856.228
Prasarana bangunan	460.836	9.198	-	-	470.034
Peralatan sentral telepon					
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	26.356.172	7.496	-	441.396	26.805.064
Peralatan dan instalasi transmisi	139.165	-	-	-	139.165
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	56.572.954	696.103	(4)	1.305.157	58.574.210
Jaringan kabel	6.502.198	155.180	-	211	6.657.589
Catu daya	21.857.982	270.570	(294)	(93)	22.128.165
Peralatan pengolahan data	5.838.258	44.040	-	230.349	6.112.647
Peralatan telekomunikasi lainnya	7.184.767	37.009	-	189.712	7.411.488
Peralatan kantor	545.194	647	-	-	545.841
Kendaraan	678.640	4.685	(2.290)	(167)	680.868
Peralatan lainnya	127.274	45	(100)	5	127.224
Aset dalam pembangunan:	105.386	1.905	-	-	107.291
Bangunan	60.099	24.899	-	(43.487)	41.511
Peralatan sentral telepon	17.155	367.789	-	(331.215)	53.729
Peralatan dan instalasi transmisi	1.173.830	1.225.253	-	(1.356.491)	1.042.592
Jaringan kabel	384	11.453	-	(22)	11.815
Catu daya	13.131	190.725	-	(173.661)	30.195
Peralatan pengolahan data	427.698	349.662	-	(305.202)	472.158
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	284.978	-	-	-	284.978
Peralatan pengolahan data	236.240	-	-	-	236.240
Peralatan kantor	437.705	-	-	-	437.705
Kendaraan	56.998	-	-	-	56.998
Aset CPE	23.307	-	-	-	23.307
Jumlah	<u>132.506.923</u>	<u>3.503.121</u>	<u>(2.688)</u>	<u>11.903</u>	<u>136.019.259</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap yang diperoleh sendiri					
Bangunan	1.351.589	34.015	-	787	1.386.391
Prasarana bangunan	323.910	15.087	-	380	339.377
Peralatan sentral telepon	15.926.334	636.333	-	298	16.562.965
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	135.327	146	-	-	135.473
Peralatan dan instalasi transmisi	19.220.612	1.333.530	-	24	20.554.166
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	2.732.847	123.494	-	283	2.856.624
Jaringan kabel	13.506.314	330.233	(294)	(226)	13.836.027
Catu daya	2.333.053	131.166	-	-	2.464.219
Peralatan pengolahan data	4.588.877	261.494	-	(5.775)	4.844.596
Peralatan telekomunikasi lainnya	462.208	3.632	-	20	465.860
Peralatan kantor	561.073	10.991	(592)	471	571.943
Kendaraan	108.049	1.584	(54)	20	109.599
Peralatan lainnya	94.866	939	-	-	95.805
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	207.323	4.814	-	-	212.137
Peralatan pengolahan data	60.162	14.824	-	1.440	76.426
Peralatan kantor	290.717	33.283	-	(927)	323.073
Kendaraan	11.640	3.977	-	-	15.617
Aset CPE	2.432	608	-	-	3.040
Jumlah	<u>61.917.333</u>	<u>2.940.150</u>	<u>(940)</u>	<u>(3.205)</u>	<u>64.853.338</u>
Nilai Buku Bersih	<u>70.589.590</u>				<u>71.165.921</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

a. Laba (rugi) dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2010	2009
Hasil penjualan aset tetap	1.451	844
Nilai buku bersih	(1.436)	(1.748)
Laba (rugi) dari pelepasan atau penjualan aset tetap	15	(904)

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO

- (i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan PT Bukaka Singtel International ("BSI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, nilai buku aset tetap ini masing-masing sebesar Rp789.585 juta dan Rp899.970 juta.
- (ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia ("MGTI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, nilai buku bersih aset tetap ini masing-masing sebesar Rp231.268 juta dan Rp434.589 juta.

c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait

- (i) Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan mengoperasikan dua satelit, Telkom-1 dan Telkom-2, terutama sebagai *backbone* hubungan transmisi untuk jaringan milik Perusahaan sendiri serta untuk penyediaan jasa *up-linking* dan *down-linking* satelit stasiun bumi untuk para pengguna domestik dan internasional. Pada tanggal 31 Maret 2010, tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat satelit Perusahaan kemungkinan tidak dapat terpulihkan.
- (ii) Pada tanggal 16 Agustus 2009, terjadi gempa bumi di Padang dan sekitarnya, wilayah Divre I Sumatera, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Agustus 2009.
- (iii) Pada tanggal 2 September 2009, terjadi gempa bumi di Tasikmalaya dan sekitarnya, wilayah Divre III Jawa Barat, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak September 2009.
- (iv) Pada tanggal 30 September 2009, terjadi gempa bumi di Padang dan sekitarnya, wilayah Divre I Sumatera, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Oktober 2009.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain

- (i) Tidak ada bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.
- (ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.
- (iii) Pada tahun 2009, peranti lunak dan peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana dan peralatan penunjang) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.163.657 juta direncanakan akan digunakan sampai dengan tahun 2011, oleh karena itu, penyusutan dipercepat sampai dengan tahun 2011. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp110.611 juta, dan sebesar Rp82.958 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.
- (iv) Pada tahun 2009, masa manfaat peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari peralatan penunjang) mengalami perubahan dari 10 tahun menjadi 5 tahun agar mencerminkan masa manfaat aset saat ini. Dampak percepatan penyusutan adalah sebesar Rp150.764 juta dan Rp68.475 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.
- (v) Pada tahun 2008, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp352.862 juta dan masa manfaat yang diharapkan sebelumnya lebih dari tahun 2010, hanya akan digunakan sampai tahun 2010. Sehubungan dengan perkembangan teknologi saat ini, peralatan tersebut hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2009. Sehingga, penyusutan peralatan tersebut dipercepat sampai dengan tanggal tersebut. Beban penyusutan dipercepat Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian pada periode berjalan adalah Rp nihil.
- (vi) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 15-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2011 hingga 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vii) Perusahaan diberikan hak untuk menggunakan beberapa bidang tanah tertentu oleh Depkominfo (dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia ("DPPT")) dimana tanah-tanah tersebut tercatat atas nama DPPT dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pengalihan hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

- (viii) Pada tanggal 31 Maret 2010, aset tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan kecuali tanah, senilai Rp72.798.686 juta dan US\$6,8 juta diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Sarana Janesia Utama, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, HSBC Insurance (Singapore) Pte, Ltd, PT Asuransi Mitra, PT Advis Terapan Proteksindo, dan PT Asuransi QBE POOL Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp795.352 juta, US\$15,89 juta, Euro0,22, dan SGD6,42 juta basis kerugian pertama Rp6.132.488 juta termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp324.000 juta dengan *Automatic Reinstatement of Loss Clause*. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US\$22,91 juta dan US\$43 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (ix) Pada tanggal 31 Maret 2010, tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 74,42% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara Juli 2010 dan April 2011. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (x) Aset tetap tertentu anak perusahaan telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).
- (xi) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk aset tetap PBH (Catatan 11), peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan Aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tahun	2010	2009
2009	-	458.450
2010	332.393	326.931
2011	229.645	118.481
2012	171.734	62.375
2013	126.263	17.607
2014	106.007	415
Selanjutnya	30.552	-
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	996.594	984.259
Bunga	(274.407)	(136.804)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	722.187	847.455
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)	(261.304)	(398.490)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)	460.883	448.965

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. ASET TETAP POLA BAGI HASIL (“PBH”)

	1 Januari 2010	Penambahan	Reklasifikasi	31 Maret 2010
Harga perolehan:				
Tanah	1.267	-	-	1.267
Peralatan sentral telepon	92.990	-	-	92.990
Peralatan dan instalasi transmisi	43.383	-	(10.014)	33.369
Jaringan kabel	406.570	-	(783)	405.787
Peralatan telekomunikasi lainnya	3.638	-	-	3.638
Jumlah	547.848	-	(10.797)	537.051
Akumulasi penyusutan:				
Tanah	981	16	-	997
Peralatan sentral telepon	29.759	1.976	-	31.735
Peralatan dan instalasi transmisi	26.396	1.569	(6.004)	21.961
Jaringan kabel	122.085	9.309	(375)	131.019
Peralatan telekomunikasi lainnya	2.696	63	-	2.759
Jumlah	181.917	12.933	(6.379)	188.471
Nilai Buku Bersih	365.931			348.580
	1 Januari 2009	Penambahan	Penyesuaian	31 Maret 2009
Harga perolehan:				
Tanah	1.313	-	-	1.313
Bangunan	338	-	-	338
Peralatan sentral telepon	152.776	-	-	152.776
Peralatan dan instalasi transmisi	100.072	-	-	100.072
Jaringan kabel	461.315	-	-	461.315
Peralatan telekomunikasi lainnya	10.547	-	-	10.547
Jumlah	726.361	-	-	726.361
Akumulasi penyusutan:				
Tanah	926	17	-	943
Bangunan	61	18	(14)	65
Peralatan sentral telepon	69.899	4.169	(298)	73.770
Peralatan dan instalasi transmisi	53.282	2.387	446	56.115
Jaringan kabel	116.234	10.494	(272)	126.456
Peralatan telekomunikasi lainnya	9.305	79	5.781	15.165
Jumlah	249.707	17.164	5.643	272.514
Nilai Buku Bersih	476.654			453.847

Sesuai dengan perjanjian PBH, hak kepemilikan atas aset tetap PBH secara legal tetap berada di mitra usaha sampai dengan berakhirnya masa bagi hasil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 terdiri dari:

	2010	2009
Uang muka pembelian aset tetap	1.421.146	789.427
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	975.736	897.669
Beban ditangguhkan PBH	242.439	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	221.035	194.234
Beban ditangguhkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (<i>Indefeasible Right of Use</i> atau "IRU")	139.902	151.257
Biaya hak atas tanah ditangguhkan	60.291	112.200
Setoran jaminan	37.045	55.897
Peralatan yang tidak digunakan dalam operasi - bersih	24.203	51.255
Lain-lain	33.380	8.849
Jumlah	3.155.177	2.260.788

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang diterima dari Pemerintah sebagai pembayaran kompensasi terminasi dini hak eksklusif untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan (Catatan 1a dan 28) dan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang dijamin untuk garansi bank.

Biaya hak atas tanah ditangguhkan merupakan biaya untuk memperpanjang hak atas tanah, yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu hak atas tanah (Catatan 10d.vi).

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, peralatan yang tidak digunakan dalam operasi merupakan *Base Transceiver Station* (BTS) dan peralatan lainnya milik Perusahaan dan Telkomsel yang untuk sementara tidak digunakan dalam operasi tetapi direncanakan akan dipasang kembali. Beban penyusutan Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp75 juta dan Rp7.404 juta.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

- (i) Perubahan nilai tercatat *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Aset tidak berwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2009	106.544	9.085.534	806.861	9.998.939
Penambahan:				
Peranti lunak Perusahaan	-	18.746	-	18.746
Peranti lunak Sigma	-	596	-	596
Peranti lunak Ad Medika	-	2.409	-	2.409
Akuisisi Ad Medika	103.352	23.278	-	126.630
Reklasifikasi	-	25.899	-	25.899
Saldo, 31 Maret 2010	209.896	9.156.462	806.861	10.173.219
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2009	(21.373)	(7.385.950)	(163.336)	(7.570.659)
Beban amortisasi untuk periode tiga bulan (Catatan 36)	(1.512)	(345.216)	(20.950)	(367.678)
Reklasifikasi	-	(15.408)	-	(15.408)
Saldo, 31 Maret 2010	(22.885)	(7.746.574)	(184.286)	(7.953.745)
Nilai Buku Bersih	187.011	1.409.888	622.575	2.219.474
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	20 tahun	6,59 tahun	9,63 tahun	
	Goodwill	Aset tidak berwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2008	106.544	8.969.599	436.000	9.512.143
Penambahan - peranti lunak Sigma	-	2.013	-	2.013
Reklasifikasi - peranti lunak GSD	-	(50)	-	(50)
Saldo, 31 Maret 2009	106.544	8.971.562	436.000	9.514.106
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2008	(17.048)	(6.202.180)	(105.107)	(6.324.335)
Beban amortisasi untuk periode tiga bulan (Catatan 36)	(1.279)	(303.730)	(11.679)	(316.688)
Reklasifikasi - peranti lunak GSD	-	4	-	4
Saldo, 31 Maret 2009	(18.327)	(6.505.906)	(116.786)	(6.641.019)
Nilai Buku	88.217	2.465.656	319.214	2.873.087
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	5 tahun	7,05 tahun	9,33 tahun	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA (lanjutan)

- (ii) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma tahun 2008 (Catatan 3a), Indonusa tahun 2008, dan Ad Medika tahun 2010 (Catatan 3b). Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat *goodwill* dari 5 tahun menjadi 20 tahun (Catatan 2d). Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009. Aset tidak berwujud lainnya timbul dari akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV, dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO.
- (iii) Beban dibayar di muka yang dibayar Telkomsel di bulan Februari 2006 untuk lisensi 3G sebesar Rp436.000 juta diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi 3G. Pada tahun 2009, Pemerintah memberikan tambahan lisensi 3G kepada Telkomsel dengan *up front fee* sebesar Rp320.000 juta yang diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama 10 tahun (Catatan 1d.a, 2j, dan 44a.ii).
- (iv) Pada tahun 2009, Perusahaan mendapatkan lisensi sebagai penyelenggara jaringan lokal tetap berbasis paket *switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*). Biaya ijin awal dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi yaitu 10 tahun.
- (v) Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat peranti lunak dari 5-10 tahun menjadi 3-5 tahun. Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.
- (vi) Estimasi beban amortisasi tahunan aset tidak berwujud lainnya untuk setiap tahun sejak 1 April 2010 adalah kurang lebih sebesar Rp1.121.196 juta per tahun.

14. REKENING ESCROW

Rekening *escrow* pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 terdiri dari:

	2010	2009
Bank Mandiri	42.503	42.811
Bank Danamon	2	1.186
Lain-lain	108	108
	42.613	44.105

Rekening *escrow* pada Bank Mandiri dibentuk sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium Konstruksi dan Pemeliharaan (*Construction and Maintenance Agreement* atau "C&MA") Palapa Ring sebagai setoran awal 5% dari nilai ikatan (Catatan 48c.ii).

Rekening *escrow* pada Bank Danamon dibentuk sehubungan dengan kerja sama bagi hasil dalam pengoperasian peralatan telekomunikasi di Divre VII Kawasan Timur Indonesia.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. HUTANG USAHA

	2010	2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Biaya hak penyelenggaraan	987.391	830.655
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	283.186	160.622
Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	219.287	238.852
Jumlah	<u>1.489.864</u>	<u>1.230.129</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	6.285.387	8.870.211
Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	72.990	9.504
Hutang sehubungan dengan PBH	12.635	32.139
Jumlah	<u>6.371.012</u>	<u>8.911.854</u>
Jumlah	<u>7.860.876</u>	<u>10.141.983</u>

Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Rupiah	6.676.171	4.015.892
Dolar A.S.	1.035.843	5.298.858
Euro	144.968	798.914
Dolar Singapura	3.004	27.093
Lain-lain	890	1.226
Jumlah	<u>7.860.876</u>	<u>10.141.983</u>

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2010	2009
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	1.756.264	1.513.581
Gaji dan tunjangan	904.082	1.128.243
Umum, administrasi, dan pemasaran	571.827	505.237
Bunga dan beban bank	265.403	236.670
Jumlah	<u>3.497.576</u>	<u>3.383.731</u>

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kartu pulsa Prabayar	2.627.674	2.634.337
Jasa telekomunikasi lainnya	8.881	29.756
Lain-lain	162.161	129.936
Jumlah	<u>2.798.716</u>	<u>2.794.029</u>

18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Bank Ekonomi	27.983	17.399
Bank CIMB Niaga	11.922	25.213
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	10.500	-
Jumlah	<u>50.405</u>	<u>42.612</u>

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

a. Bank Ekonomi

Pada tanggal 14 Oktober 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp7.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 13,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 9 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2009 sebesar Rp7.500 juta dan pada tanggal 2 Juli 2009, pinjaman telah dilunasi.

Pada tanggal 2 Desember 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp5.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2009 sebesar Rp5.500 juta dan pada tanggal 9 Oktober 2009, pinjaman telah dilunasi.

Pada tanggal 11 Februari 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar US\$550.000 untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga 6% per tahun dan dibayarkan selama 3 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2010. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar US\$187.052,71 (setara dengan Rp1.702 juta) dan US\$380.000 (setara dengan Rp4.399 juta).

Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp35.000 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 13,50% per tahun dan dibayarkan selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp26.281 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

b. Bank CIMB Niaga

(i) Pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit yang terdiri dari fasilitas kredit yang dapat diperpanjang sebesar Rp800 juta dan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta (Catatan 22f.ii) dengan Bank CIMB Niaga. Atas perjanjian kredit ini telah dilakukan beberapa kali amandemen. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, fasilitas kredit, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo masing-masing menjadi Rp15.000 juta, 14% per tahun, dan 29 Mei 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp6.922 juta dan Rp15.000 juta.

Pada tanggal 29 April 2008, Balebat mendapatkan tambahan Fasilitas Transaksi Khusus dan Fasilitas Rekening Koran masing-masing sebesar Rp5.000 juta dan Rp500 juta. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, tingkat bunga masing-masing menjadi 14% per tahun dan 14,25% per tahun serta tanggal jatuh tempo masing-masing menjadi 29 Mei 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010 saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp5.000 juta dan Rp nihil dan pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp5.000 juta dan Rp213 juta.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat.

(ii) Pada tanggal 18 Oktober 2005, GSD menandatangani dua perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp12.000 juta dan Rp3.000 juta. Perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut telah beberapa kali diamandemen. Perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2008 dengan penambahan fasilitas pinjaman menjadi Rp19.000 juta dengan tingkat bunga 15,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2009. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik GSD yang berlokasi di Jakarta (Catatan 10). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2009 sebesar Rp5.000 juta dan pada tanggal 10 Juli 2009, pinjaman telah dilunasi.

c. BSM

Pada tanggal 20 Agustus 2009, Balebat menandatangani fasilitas pinjaman yang dapat diperpanjang sebesar Rp15.000 juta dengan BSM, untuk keperluan modal kerja. Pinjaman tersebut diperoleh melalui prinsip syariah dengan tingkat estimasi pengembalian pinjaman 15,30% per tahun dan dijamin dengan aset tetap tertentu (Catatan 10), piutang (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), asuransi, dan *letter of comfort*. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2010. Pada tanggal 31 Maret 2010, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp10.500 juta.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG

a. *Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun*

	Catatan	2010	2009
Hutang bank	22	6.058.319	5.008.936
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan			
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	23	1.015.776	1.262.104
Hutang sewa pembiayaan	20	414.185	472.730
Wesel	10	261.304	398.490
	21	18.309	-
Jumlah		7.767.893	7.142.260

b. *Bagian jangka panjang*

(Dalam miliaran Rupiah)							
	Catatan	Jumlah	2011	2012	2013	2014	Selanjutnya
Hutang bank	22	9.046,1	1.858,0	2.835,8	2.822,3	1.479,7	50,3
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20	2.878,0	260,3	388,8	314,1	316,5	1.598,3
Hutang sewa pembiayaan	10	460,9	160,2	128,4	101,7	45,5	25,1
Wesel	21	113,5	16,7	45,3	21,5	30,0	-
Jumlah		12.498,5	2.295,2	3.398,3	3.259,6	1.871,7	1.673,7

20. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS)

Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya dan laba atau rugi selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari bank luar negeri pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Valuta	Suku bunga		Saldo	
	2010	2009	2010	2009
Dolar A.S.	4,00% - 6,67%	4,00% - 6,67%	1.184.694	1.725.649
Rupiah	6,65% - 10,30%	11,47% - 12,27%	983.531	1.174.363
Yen Jepang	3,10%	3,10%	1.123.972	1.447.456
Jumlah			3.292.197	4.347.468
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)			(414.185)	(472.730)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)			2.878.012	3.874.738

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN PENERUSAN (TWO-STEP LOANS) (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Pinjaman penerusan yang terhutang dalam Rupiah dikenakan berbagai tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang berdasarkan rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") berjangka waktu tiga bulan selama 6 bulan terakhir sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran ditambah 1% per tahun, dan tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 5,25% per tahun. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam valuta asing dikenakan tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 0,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi masing-masing 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman yang masing-masing berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

21. WESEL BAYAR

	2010
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium Term Notes</i> atau "MTN")	
Metra	50.000
Sigma	30.000
Finnet	25.000
Pembiayaan pemasok	
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	4.144
Huawei Tech	22.628
	<hr/> 131.772
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)	(18.309)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)	<hr/> 113.463 <hr/>

a. MTN Metra

Pada tanggal 9 Juni 2009, Metra mengadakan perjanjian dengan PT Bahana Securities ("Bahana Securities") (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan wesel bayar jangka menengah (*Medium Term Notes* atau "MTN") dengan total pokok hutang sebesar Rp50.000 juta. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. WESEL BAYAR (lanjutan)

a. MTN Metra (lanjutan)

Penerbitan MTN dilaksanakan secara bertahap sebanyak-banyaknya dalam 4 (empat) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp50.000 juta, masing-masing tahapan akan berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Tahap pertama yang telah diterbitkan sebesar Rp30.000 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2012.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Metra menerbitkan MTN tahap kedua sebesar Rp20.000 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2013.

Bunga atas MTN terhutang setiap triwulan sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN dihitung dengan menggunakan tingkat bunga mengambang, untuk tahun pertama sebesar 15,05%, untuk tahun kedua dan ketiga sebesar tingkat pengembalian rata-rata (*yield*) dari 3 (tiga) Surat Utang Negara yang memiliki sisa jangka waktu yang sama dengan waktu MTN tahun kedua dan ketiga ditambah dengan premi sebesar 4,02%. Pelunasan pokok masing-masing 10%, 20%, dan 70% pada ulang tahun pertama, kedua, dan ketiga Tanggal Penerbitan.

Bunga MTN tahap kedua untuk pertama kalinya ditetapkan bersama-sama oleh Penerbit dan Arranger sebesar 12,01% yang dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2010, sedangkan untuk kedua kalinya dan selanjutnya akan dihitung oleh Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Induk.

Metra memberikan jaminan dengan nilai minimal 40% dari nilai Pokok MTN yang masih terhutang. Maksimal 60% nilai pokok MTN yang masih terhutang tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (*pari passu*) dengan kewajiban Metra lainnya yang tidak dijamin. Metra dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Metra diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 1,5:1;
2. *EBITDA to Interest Ratio* minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Metra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. MTN Sigma

Pada tanggal 16 Oktober 2009, Sigma mengadakan perjanjian dengan Bahana Securities (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan MTN dengan total pokok hutang sebesar Rp30.000 juta. KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha.

MTN diterbitkan dengan penempatan terbatas dalam 1 (satu) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp30.000 juta dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. WESEL BAYAR (lanjutan)

b. MTN Sigma (lanjutan)

Bunga atas MTN terhutang setiap semesteran sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN untuk tahun pertama sebesar 14,5% sejak tanggal penerbitan, untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima terhitung sejak Tanggal Penerbitan adalah rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah 800 basis poin premi, yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan selama 6 bulan terakhir pada saat penetapan bunga MTN.

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Sigma baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Sigma diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 2,5:1;
2. Hutang yang dibiayai dan EBITDA maksimal lima kali di tahun 2009, tiga setengah kali di tahun 2010 dan dua setengah kali di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Sigma memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

c. MTN Finnet

Pada tanggal 16 Oktober 2009, Finnet mengadakan perjanjian dengan Bahana Securities (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan MTN dengan total pokok hutang sebesar Rp25.000 juta. KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk investasi perangkat keras dan lunak, pembangunan proyek, dan pembayaran *bridging loan* untuk pelaksanaan proyek.

MTN direncanakan untuk diterbitkan dengan penempatan terbatas secara bertahap sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp25.000 juta dengan batas penerbitan terakhir adalah 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan MTN tahap pertama. Tahap pertama telah diterbitkan sebesar Rp10.000 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2012. Pelunasan pokok masing-masing 1% pada setiap bulan ke-7 sampai ke-12, masing-masing 2% pada setiap bulan ke-13 sampai ke-35, sisa pokok sebesar 48% pada tanggal 17 November 2012.

Pada tanggal 18 Maret 2010, Finnet menerbitkan MTN tahap kedua sebesar Rp15.000 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2013.

Bunga atas MTN terhutang setiap bulan sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN sebesar 16,25% per tahun.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. WESEL BAYAR (lanjutan)

c. MTN Finnet (lanjutan)

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Finnet baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Finnet lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Finnet dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Finnet diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 2,5:1;
2. *EBITDA to Interest Ratio* minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Finnet memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

d. Pembiayaan pemasok ZTE

Pada tanggal 10 Desember 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan pemasok dengan ZTE. Fasilitas tanpa jaminan tersebut merupakan 85% dari nilai Berita Acara Serah Terima ("BAST") I Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder Paket-2.

Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") 6 bulan ditambah 2,50% per tahun (US\$) yang akan dilunasi dalam 5 kali angsuran semesteran yang dimulai sejak bulan Desember 2009. Saldo pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar US\$0,46 juta (setara dengan Rp4.144 juta).

e. Pembiayaan pemasok Huawei

Pada tanggal 19 Maret 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan pemasok dengan ZTE. Fasilitas tanpa jaminan tersebut merupakan 85% dari nilai Berita Acara Serah Terima ("BAST") I Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Softswitch dan Modernisasi MSAN Divre I sampai dengan Divre IV.

Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") 6 bulan ditambah 2,50% per tahun (US\$) yang akan dilunasi dalam 5 kali angsuran semesteran yang dimulai sejak bulan September 2010. Saldo pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar US\$2,5 juta (setara dengan Rp22.628 juta).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. HUTANG BANK

Rincian hutang bank jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Mata uang	2010		2009		
		Jumlah fasilitas (dalam jutaan)	Saldo terhutang		Saldo terhutang	
			Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
The Export-Import Bank of Korea ("Korea Eximbank")	US\$	124	35	320.930	59	680.433
Bank Mandiri	Rp	4.750.000	-	2.707.778	-	2.030.000
BCA	Rp	3.000.000	-	2.177.778	-	1.000.000
Citibank	Rp	500.000	-	200.000	-	400.000
BNI	Rp	3.500.000	-	1.150.000	-	2.250.000
Bank CIMB Niaga	Rp	33.496	-	24.442	-	27.909
Bank Bukopin	Rp	5.300	-	510	-	1.824
BRI	Rp	3.800.000	-	1.911.111	-	2.560.000
Bank Ekonomi	Rp	115.000	-	74.349	-	52.445
Sindikasi bank	Rp	5.100.000	-	4.800.000	-	2.400.000
PT ANZ Panin Bank ("ANZ Panin")	Rp	1.000.000	-	888.889	-	-
BI	Rp	500.000	-	444.444	-	-
PT Bank OCBC Indonesia ("OCBC Indonesia")	Rp	200.000	-	100.000	-	-
OCBC NISP	Rp	500.000	-	250.000	-	-
ABN Amro Bank N.V., Hong Kong ("AAB Hong Kong")	US\$	318	-	-	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")	US\$	266	-	-	-	-
Bank of China ("BoC")	US\$	100	5	45.686	-	-
Finnish Export Credit Ltd	US\$	250	-	-	-	-
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	60	-	-	-	-
BTN	Rp	9.500	-	8.534	-	-
Jumlah				15.104.451		11.402.611
Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)				(6.058.319)		(5.008.936)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)				9.046.132		6.393.675

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

a. Korea Eximbank

Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Korea Eximbank dengan fasilitas sebesar US\$124 juta yang digunakan untuk membiayai pengadaan Code Division Multiple Access ("CDMA") dari Konsorsium Samsung. Pinjaman tersebut dikenakan bunga, komitmen, dan biaya lainnya sebesar 5,68% per tahun. Pinjaman ini tidak dijamin dan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember setiap tahunnya sejak Desember 2006.

b. Bank Mandiri

(i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang suku bunga antar bank Jakarta ("*Jakarta Interbank Offered Rate*" atau "*JIBOR*") berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 24 Juli 2007, perjanjian kredit diamandemen dengan menambah fasilitas kredit sebesar Rp200.000 juta. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp280.000 juta dan pada tanggal 30 Januari 2010, pinjaman telah dilunasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. HUTANG BANK (lanjutan)

b. Bank Mandiri (lanjutan)

- (ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp150.000 juta dan Rp450.000 juta.
- (iii) Pada tanggal 23 Desember 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp1.300.000 juta. Pada tanggal 30 Desember 2008, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp1.000.000 juta dan sisanya sebesar Rp300.000 juta telah ditarik pada tanggal 30 Januari 2009. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 2,25% per tahun yang terhutang bulanan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp780.000 juta dan Rp1.300.000 juta.
- (iv) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp1.777.778 juta.

c. BCA

- (i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp200.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.
- (ii) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp800.000 juta.
- (iii) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp1.777.778 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

d. Citibank

Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Citibank, cabang Jakarta sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,09% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan.

e. BNI

- (i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp200.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.
- (ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp150.000 juta dan Rp450.000 juta.
- (iii) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu 1 bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp800.000 juta dan Rp1.600.000 juta.
- (iv) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000 juta. Pada tanggal 9 Juli 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp200.000 juta.

f. Bank CIMB Niaga

- (i) Pada tanggal 28 Desember 2004, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas sebesar Rp2.200 juta untuk membiayai pembelian mesin ("Fasilitas Transaksi Khusus"). Fasilitas Transaksi Khusus dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2005. Fasilitas ini akan jatuh tempo 28 Juni 2010. Atas perjanjian kredit ini telah dilakukan beberapa kali amandemen. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, tingkat bunga 14% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp73 juta dan Rp513 juta.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. HUTANG BANK (lanjutan)

f. Bank CIMB Niaga

(i) (lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2006, Balebat juga mendapatkan tambahan fasilitas Rp2.000 juta untuk pembelian mesin cetak. Fasilitas ini akan jatuh tempo 30 Oktober 2011. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp799 juta dan pada tanggal 23 Juni 2009, pinjaman telah dilunasi.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat.

- (ii) Sesuai penjelasan di Catatan 18b, pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp2.400 juta termasuk fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan dengan jumlah yang tidak sama dihitung sejak November 2005 sampai dengan Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dikenakan tingkat bunga 14% per tahun. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp235 juta dan pada tanggal 25 Oktober 2009, pinjaman telah dilunasi.
- (iii) Pada tanggal 29 Mei 2006, Infomedia menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp18.500 juta untuk keperluan pendanaan investasi proyek *call center* dengan Telkomsel. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 15% per tahun dan dijamin dengan piutang dari kontrak *call center* dengan Telkomsel senilai Rp23.125 juta sampai dengan jatuh tempo pinjaman 36 bulan setelah pencairan (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp1.840 juta dan pada tanggal 19 Juni 2009, pinjaman telah dilunasi.
- (iv) Pada bulan Maret 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-2) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp20.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 13% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 8 tahun diangsur dalam 33 kali angsuran triwulanan dan jatuh tempo pada bulan Mei 2015. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp17.350 juta dan Rp18.650 juta.
- (v) Pada tanggal 23 November 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-3) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp8.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 11% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 5 tahun diangsur dalam 60 kali angsuran bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2012. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp4.276 juta dan Rp5.872 juta.
- (vi) Pada tanggal 28 Juli 2009, Balebat menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp3.296 juta, yang akan jatuh tempo pada 28 November 2014. Pada tanggal 28 Agustus 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp2.743 juta. Fasilitas kredit investasi dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan dengan jumlah yang tidak sama dihitung sejak 28 Desember 2009 sampai dengan 28 November 2014. Fasilitas kredit investasi dikenakan tingkat bunga 14% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat. Saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp2.743 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

g. Bank Bukopin

Pada tanggal 11 Mei 2005, Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bukopin untuk beberapa fasilitas kredit maksimum sebesar Rp5.300 juta untuk membiayai pembelian aset tetap. Pinjaman dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan dan dikenakan tingkat bunga masing-masing 15,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. Sebagian dari fasilitas ini, yakni sebesar Rp4.200 juta akan jatuh tempo pada bulan Juni 2010 dan sisanya sebesar Rp1.100 juta akan jatuh tempo pada bulan Desember 2010. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik Infomedia (Catatan 10).

h. BRI

- (i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp400.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp160.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.
- (ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tahun 2008 pinjaman tersebut telah ditarik sepenuhnya. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp800.000 juta dan Rp1.600.000 juta.
- (iii) Pada tanggal 28 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp800.000 juta.
- (iv) Pada tanggal 2 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp800.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp711.111 juta.

i. Bank Ekonomi

- (i) Pada tanggal 7 Desember 2006, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp14.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 63 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 September 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp8.424 juta dan Rp10.812 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

i. Bank Ekonomi (lanjutan)

- (ii) Pada tanggal 9 Maret 2007, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp13.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 Desember 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp6.727 juta dan Rp8.633 juta.
- (iii) Pada tanggal 10 September 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp33.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 78 kali angsuran bulanan sejak tanggal 11 Maret 2009 dan berakhir 11 Maret 2015. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp29.110 juta dan Rp33.000 juta.
- (iv) Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp65.000 juta. Pada tanggal 17 September 2009, perjanjian diamandemen dengan mengubah fasilitas pinjaman menjadi Rp35.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 13,5% per tahun yang dibayar dalam 36 kali angsuran bulanan yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2012. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp23.551 juta.
- (v) Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp20.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 15,5% per tahun yang dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2013. Pada tanggal 19 November 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp7.000 juta. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp6.537 juta.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sigma yang berlokasi di Surabaya (Catatan 10) dan piutang usaha Sigma (Catatan 5) dan juga memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Sigma untuk mendapatkan izin tertulis dari Bank Ekonomi sebelum menjadi penjamin atas hutang pihak ketiga, menjaminkan tanah tersebut ke bank lain atau pihak ketiga, menyewakan tanah tersebut ke pihak ketiga, menarik dana fasilitas kredit melebihi batas maksimum, mengubah status hukum Sigma, membayar atau menyatakan dividen, dan membayar piutang pemegang saham.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Sigma memenuhi persyaratan tersebut di atas.

j. Sindikasi Bank

- (i) Pada tanggal 29 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan sindikasi BNI, BRI, dan Bank Jabar (sindikasi bank) sebesar Rp2.400.000 juta yang akan dibayar dalam 8 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya masa ketersediaan. Bank BNI, yang bertindak sebagai agen fasilitas, membebaskan bunga sebesar tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,2% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2013. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pokok pinjaman terhutang masing-masing sebesar Rp2.100.000 juta dan Rp2.400.000 juta

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

j. Sindikasi Bank (lanjutan)

(i) (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah menaatinya pada tanggal 31 Maret 2010, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1.
2. Rasio *debt service coverage* harus melebihi dari 125%.

- (ii) Pada tanggal 16 Juni 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan sindikasi BNI dan BRI (sindikasi bank) sebesar Rp2.700.000 juta yang akan dibayar dalam 8 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya masa ketersediaan. Bank BNI, yang bertindak sebagai agen fasilitas, membebankan bunga sebesar tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 2,45% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2014. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Maret 2010 sebesar Rp2.700.000 juta.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah menaatinya pada tanggal 31 Maret 2010, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1.
2. Rasio *debt service coverage* harus melebihi dari 125%.

k. ANZ Panin

Pada tanggal 4 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan ANZ Panin sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 2,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan.

l. BII

Pada tanggal 15 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BII sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan.

m. OCBC Indonesia

Pada tanggal 2 November 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan OCBC Indonesia sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 2 Februari 2010, Telkomsel menarik fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

n. OCBC NISP

Pada tanggal 2 November 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan OCBC NISP sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 2 Februari 2010, Telkomsel menarik fasilitas pinjaman sebesar Rp250.000 juta.

o. AAB Hong Kong

Pada tanggal 30 Desember 2009, sesuai dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia") dan Ericsson AB (Catatan 48a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility ("fasilitas") dengan AAB Hong Kong dan SCB ("Arrangers") berkaitan dengan penyediaan Fasilitas sejumlah US\$318 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson.

Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US\$117 juta, US\$106 juta, dan US\$95 juta.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 0,2% per tahun dan SEK *Funding Cost* sebesar 0,62% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal Fasilitas digunakan.

Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2010.

p. ICBC

Pada tanggal 30 Desember 2009, sesuai dengan perjanjian kemitraan dengan Huawei International Pte.Ltd. ("Huawei International") dan PT Huawei Tech Investment ("Huawei Tech") (Catatan 48a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian *Sinosure-Backed Facility* ("fasilitas") dengan ICBC ("Arranger") berkaitan dengan penyediaan Fasilitas sejumlah US\$266 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Huawei.

Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1 dan 2 masing-masing sebesar US\$166 juta dan US\$100 juta.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 1,2% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan.

Tidak ada Fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2010.

q. BoC

Pada tanggal 30 Desember 2009, Telkomsel mengadakan perjanjian pinjaman jangka panjang BoC berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US\$100 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari pemasok China.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 2,55% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. HUTANG BANK (lanjutan)

r. Finnish Export Credit Ltd

Pada tanggal 2 Maret 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan Finnish Export Credit Ltd. sebesar US\$250 juta. Fasilitas ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan jasa Nokia Siemens Network.

Tidak ada Fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2010.

Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya, kecuali deposito berjangka (Catatan 8 dan 47h). Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Manajemen Telkomsel berpendapat tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian.

s. JBIC

Pada tanggal 26 Maret 2010, sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu (Catatan 48a.i), Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation, *the international arm of Japan Finance Corporation* berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US\$59,89 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$ 35,93 juta dan US\$23,96 juta. Fasilitas dibayar dalam 10 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak tanggal fasilitas digunakan Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut masing-masing ditentukan sebesar 4,56% dan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 0,70% per tahun dan tanpa jaminan. Sampai dengan tanggal laporan konsolidasian ini diterbitkan, tidak ada fasilitas yang digunakan.

t. BTN

Pada tanggal 10 September 2009, Ad Medika menandatangani perjanjian pinjaman dengan BTN sebesar Rp9.500 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga tetap 14,75% per tahun yang dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 agustus 2014. Sampai dengan 31 Maret 2010 pinjaman tersebut telah ditarik sepenuhnya.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap berupa tanah milik Ad Medika yang berlokasi di Jakarta (Catatan 10) dan piutang usaha Ad Medika (Catatan 5).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
**31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009**
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITANGGUHKAN

Nilai perolehan yang ditangguhkan merupakan kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Saham Penjual MGTI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO IV dan ke BSI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO VII, dengan penjelasan sebagai berikut:

	2010	2009
Transaksi KSO IV		
MGTI	621.390	1.715.567
Dikurangi diskonto	(18.987)	(119.942)
	<u>602.403</u>	<u>1.595.625</u>
Transaksi KSO VII		
BSI	437.234	962.720
Dikurangi diskonto	(23.861)	(116.540)
	<u>413.373</u>	<u>846.180</u>
Jumlah	1.015.776	2.441.805
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun - setelah dikurangi diskonto (Catatan 19a)	<u>(1.015.776)</u>	<u>(1.262.104)</u>
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto (Catatan 19b)	<u>-</u>	<u>1.179.701</u>

a. *Transaksi KSO IV*

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO IV merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO IV oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan MGTI pada tanggal 20 Januari 2004. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO IV, Perusahaan menyetujui untuk membayar MGTI dengan nilai total pembelian berkisar US\$390,7 juta (setara dengan Rp3.285.362 juta) yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar US\$517,1 juta), yang harus dibayar kepada MGTI sejak Februari 2004 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 8,3%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada MGTI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US\$68,29 juta (setara dengan Rp621.390 juta) dan US\$148,2 juta (setara dengan Rp1.715.567 juta).

b. *Transaksi KSO VII*

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO VII merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO VII oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan BSI pada tanggal 19 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO VII, Perusahaan menyetujui untuk membayar BSI dengan nilai total pembelian berkisar Rp1.770.925 juta yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar Rp2.359.230 juta), yang harus dibayar kepada BSI sejak Oktober 2006 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 15%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada BSI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar Rp437.234 juta dan Rp962.720 juta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

24. HAK MINORITAS

	2010	2009
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan:		
Telkomsel	11.857.827	10.361.606
Metra	68.022	60.803
Infomedia	6.318	158.682
Jumlah	11.932.167	10.581.091
	2010	2009
Hak minoritas atas laba (rugi) anak perusahaan:		
Telkomsel	989.419	901.101
Metra	1.115	2.089
Infomedia	(554)	(5.092)
Jumlah	989.980	898.098

25. MODAL SAHAM

Keterangan	2010		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	52,47	2.580.118
The Bank of New York Mellon Corporation	1.738.727.056	8,84	434.682
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	4
Indra Utoyo	5.508	-	1
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.610.203.900	38,69	1.902.551
Jumlah	19.669.424.780	100,00	4.917.356
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27)	490.574.500	-	122.644
Jumlah	20.159.999.280	100,00	5.040.000

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	2009		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	52,47	2.580.118
JPMCB US Resident (Norbax Inc.)	1.216.193.600	6,18	304.049
The Bank of New York Mellon Corporation (dahulu The Bank of New York Company, Inc.)	2.001.372.016	10,18	500.343
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	4
Indra Utoyo	5.508	-	1
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.131.365.340	31,17	1.532.841
Jumlah	19.669.424.780	100,00	4.917.356
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27)	490.574.500	-	122.644
Jumlah	20.159.999.280	100,00	5.040.000

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal kepada seluruh pemegang Saham Seri B.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2010	2009
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446.666	1.446.666
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373.333)	(373.333)
Jumlah	1.073.333	1.073.333

27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham Seri B tahap I, II, dan III berdasarkan keputusan para pemegang saham (Catatan 1c), dan pada saat kondisi pasar berpotensi krisis berdasarkan Ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan telah membeli kembali masing-masing 490.574.500 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, masing-masing setara dengan 2,43% dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian masing-masing sebesar Rp4.264.073 juta hingga 31 Maret 2010 dan 2009 (sudah termasuk biaya jasa perantara dan kustodian).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Perusahaan merencanakan untuk mempertahankan, menjual, atau menggunakan saham yang diperoleh kembali untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.2 dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selama periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham. Sampai dengan tanggal neraca konsolidasian, tidak ada saham yang dibeli, kemudian dijual kembali.

28. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS SEPENGENDALI

Saldo akun ini berjumlah Rp478.000 juta berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri. Seperti dijelaskan pada Catatan 1a, pada tanggal 15 Desember 2005, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusifitas dengan Menkominfo - DJPT dan amandemennya pada tanggal 18 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah menyetujui untuk membayar sebesar Rp478.000 juta, bersih setelah pajak, kepada Perusahaan secara bertahap selama lima tahun. Selain itu, Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp416.773 juta dan Rp296.871 juta.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp478.000 juta dan Rp360.000 juta terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dari hak eksklusif yang dibayarkan tahunan oleh Pemerintah sejak 2005 sampai dengan 2008 masing-masing sebesar Rp90.000 juta dan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp118.000 juta. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan.

29. PENDAPATAN TELEPON

	2010	2009
Tidak bergerak		
Percakapan lokal dan SLJJ	2.411.778	2.572.391
Pendapatan abonemen bulanan	849.342	912.731
Pendapatan pasang baru	23.115	31.836
Lain-lain	57.852	66.308
Jumlah	<u>3.342.087</u>	<u>3.583.266</u>
Seluler		
Pendapatan pemakaian	6.352.216	5.882.379
Fitur	193.653	115.632
Pendapatan abonemen bulanan	107.575	443.961
Pendapatan jasa penyambungan	37.776	57.391
Jumlah	<u>6.691.220</u>	<u>6.499.363</u>
Jumlah Pendapatan Telepon	<u>10.033.307</u>	<u>10.082.629</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. PENDAPATAN INTERKONEKSI

	2010	2009
Interkoneksi seluler	684.928	757.716
Interkoneksi internasional	263.158	272.527
Lain-lain	68.571	61.681
Jumlah - Bersih	1.016.657	1.091.924

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006, menetapkan bahwa implementasi tarif interkoneksi berbasis alokasi biaya mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2007 (Catatan 47).

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

31. PENDAPATAN DATA, INTERNET, DAN JASA TEKNOLOGI INFORMATIKA

	2010	2009
<i>Short Messaging Service</i> ("SMS")	2.786.459	2.498.118
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	2.155.330	1.476.830
VoIP	38.664	24.085
<i>e-Business</i>	14.297	7.866
Jumlah	4.994.750	4.006.899

32. PENDAPATAN JARINGAN

	2010	2009
Sewa sirkit	159.899	180.052
Sewa <i>transponder</i> satelit	117.571	83.418
Jumlah	277.470	263.470

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

33. PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI LAINNYA

	2010	2009
<i>Customer premise equipment</i> ("CPE") dan Terminal	105.428	101.158
Kewajiban Pelayanan Universal	79.063	-
<i>Directory assistance</i>	13.665	30.373
Lain-lain	66.982	41.852
Jumlah	265.138	173.383

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

34. BEBAN USAHA - KARYAWAN

	2010	2009
Gaji dan tunjangan	762.827	762.429
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	516.237	657.481
PPH karyawan	329.466	152.454
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 41a)	88.061	132.030
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 43)	59.736	82.811
Perumahan	53.174	52.049
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41b)	16.469	20.367
Beban LSA dan terminasi LSA (Catatan 42)	11.188	6.855
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 41c)	3.879	3.711
Pengobatan	1.560	1.581
Lain-lain	31.503	32.998
Jumlah	1.874.100	1.904.766

35. BEBAN USAHA - OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

	2010	2009
Operasi dan pemeliharaan	2.102.929	1.904.855
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 48c.iii)	907.921	557.790
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	284.241	261.396
Beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu telepon, SIM, dan RUIM	196.521	277.913
Listrik, gas, dan air	161.485	149.014
Sewa sirkit dan CPE	100.654	110.833
Asuransi	94.570	75.808
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	59.084	63.396
Beban pokok jasa teknologi informatika	41.340	44.030
Perjalanan	13.267	13.297
Lain-lain	4.345	2.596
Jumlah	3.966.357	3.460.928

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI

	2010	2009
Amortisasi <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud lainnya (Catatan 13)	367.678	316.688
Beban penagihan	181.063	148.695
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6)	150.218	126.291
Keamanan dan <i>screening</i>	57.635	64.359
Perjalanan	56.977	51.616
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	40.699	33.647
Jasa profesional	38.825	16.126
Rapat	18.807	15.834
Sumbangan sosial dan umum	18.244	17.433
Alat tulis dan cetakan	14.590	13.421
Sewa kendaraan	11.053	17.208
Penelitian dan pengembangan	2.060	951
Lain-lain	25.820	18.988
Jumlah	983.669	841.257

37. BEBAN USAHA - INTERKONEKSI

	2010	2009
Interkoneksi seluler	388.320	427.007
Interkoneksi internasional	243.390	273.439
Lain-lain	38.510	43.388
Jumlah - Bersih	670.220	743.834

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

38. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	2010	2009
Anak perusahaan		
PPh badan	62.133	5.484
PPh - termasuk bunga		
Pasal 21 - PPh pribadi	-	388
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	211.321
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	213	3.950
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") - termasuk bunga	216.237	1.811
	278.583	222.954

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak dibayar di muka

	2010	2009
Perusahaan		
PPH badan	255.168	255.168
	255.168	255.168
Anak perusahaan		
PPH badan	82.501	535.708
PPN	44.948	11.299
PPH		
Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor	37	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	5.797	1.525
	133.283	548.532
	388.451	803.700

c. Hutang pajak

	2010	2009
Perusahaan		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	5.575	-
Pasal 21 - PPh pribadi	35.189	34.588
Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor	2.050	3.510
Pasal 23 - Penyerahan jasa	7.476	12.241
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	5.411	6.714
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	3.849	1.298
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	46.941	220.976
PPN	247.133	258.545
	353.624	537.872
Anak perusahaan		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	18.452	-
Pasal 21 - PPh pribadi	31.324	22.445
Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor	2	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	64.491	56.184
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	320.099	321.936
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	47.467	16.919
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	785.607	72.209
PPN	179.810	136.269
	1.447.252	625.964
	1.800.876	1.163.836

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kini		
Perusahaan	131.335	434.005
Anak perusahaan	905.124	971.605
	<u>1.036.459</u>	<u>1.405.610</u>
Tanggungan		
Perusahaan	266.982	(36.758)
Anak perusahaan	68.938	30.011
	<u>335.920</u>	<u>(6.747)</u>
	<u>1.372.379</u>	<u>1.398.863</u>

e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan PPh badan di Indonesia).

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan dan beban PPh konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Laba sebelum pajak konsolidasian	5.138.948	4.754.846
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	1.806.834	1.621.543
Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi	6.945.782	6.376.389
Dikurangi: laba sebelum pajak anak perusahaan	(3.789.597)	(3.521.257)
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.156.185	2.855.132
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(134.879)	(200.327)
	<u>3.021.306</u>	<u>2.654.805</u>
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	755.326	743.345
Penghasilan tidak kena pajak	(451.818)	(454.293)
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	89.175	86.046
Aset pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih	(2.668)	(1.669)
	<u>390.015</u>	<u>373.429</u>
Beban PPh badan	390.015	373.429
Beban PPh final	8.302	23.818
Jumlah beban PPh - Perusahaan	398.317	397.247
Beban PPh - anak perusahaan	974.062	1.001.616
Jumlah beban PPh konsolidasian	<u>1.372.379</u>	<u>1.398.863</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.156.185	2.855.132
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(134.879)	(200.327)
	<u>3.021.306</u>	<u>2.654.805</u>
Perbedaan temporer:		
Amortisasi aset tidak berwujud	245.741	245.871
Penyusutan aset tetap	(4.525)	9.061
Penyisihan piutang ragu-ragu	109.411	84.401
Penyisihan beban karyawan	112.038	84.153
Penyusutan aset tetap PBH	12.933	17.164
Sewa pembiayaan	(11.332)	(7.150)
Rugi (laba) selisih kurs atas nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	(23.878)	97.414
Penyisihan persediaan usang	3.343	3.037
Amortisasi hak atas tanah	(1.059)	(1.021)
Laba atas penjualan aset tetap	(9.518)	-
Amortisasi pendapatan PBH ditangguhkan	(16.823)	(31.651)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(140.122)	(101.119)
Pembayaran nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	(292.548)	(294.983)
Penyisihan beban Pendi	(1.028.639)	-
Penyisihan lain-lain	(33.621)	20.144
Jumlah perbedaan temporer	(1.078.599)	125.321
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	57.459	82.811
Amortisasi diskonto wesel bayar	-	520
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan	(1.807.271)	(1.622.474)
Lain-lain	299.240	223.972
Jumlah perbedaan tetap	(1.450.572)	(1.315.171)
Laba kena pajak	492.135	1.464.955
Beban Pajak kini	123.033	410.187
Beban Pajak final	8.302	23.818
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	131.335	434.005
Beban pajak kini - anak perusahaan	905.124	971.605
Jumlah pajak kini	1.036.459	1.405.610

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Perusahaan saat ini sedang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) untuk tahun fiskal 2008. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Sehubungan dengan perhitungan kembali penyusutan menurut pajak untuk tahun fiskal 2006, Telkomsel mengakui lebih bayar atas pajak yang telah dilaporkan sebelumnya sebesar Rp12,5 miliar. Saat ini Telkomsel sedang diperiksa oleh DJP untuk tahun fiskal 2006. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan masih dalam proses.

Pada tahun 2007, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) atas potongan pajak penghasilan, PPN, dan PPh badan termasuk denda untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp478 miliar. Kurang bayar pajak tersebut dilunasi melalui kompensasi potongan pajak penghasilan yang dibayar tahun 2006 sebesar Rp25 miliar dan pembayaran tunai sebesar Rp453 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2008, Telkomsel mengajukan keberatan atas kurang bayar potongan pajak penghasilan dan PPN termasuk denda sebesar Rp408 miliar.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2008, DJP menerima hasil keberatan sebesar Rp141 miliar. Pada Februari 2009, Telkomsel menerima jumlah tersebut dan imbalan bunga sebesar Rp39 miliar. Pada tanggal 23 Februari 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatan PPN yang ditolak sebesar Rp215 miliar dan mengakui sebagai tagihan restitusi pajak (Catatan 38a). Sisa tagihan yang tidak diterima sebesar Rp52 miliar dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008. Pada tanggal 3 Maret 2010, Pengadilan Pajak mengumumkan persetujuan atas sebagian besar keberatan Telkomsel atas PPN untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp215 miliar. Tetapi, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel belum menerima keputusan resmi dari Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 2 Oktober 2007, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan DJP terhadap keberatan Telkomsel untuk hasil pemeriksaan kurang bayar potongan PPh pasal 23 dan 26 untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp115 miliar.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Desember 2008, keberatan Telkomsel diterima dan jumlah sebesar Rp115 miliar dapat diperoleh kembali. Pada bulan Februari 2009, Telkomsel mengakui jumlah yang diterima tersebut berikut imbalan bunga sebesar Rp52 miliar, setelah dikurangi kurang bayar berbagai jenis pajak .

Pada tanggal 25 Februari 2009, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (“MA”), atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima permohonan banding Telkomsel untuk pengembalian sebesar Rp115 miliar. Telkomsel berkeyakinan bahwa keputusan Pengadilan Pajak tersebut sudah tepat. Pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan sanggahan ke MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, peninjauan kembali tersebut masih dalam proses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 12 Februari 2009, Telkomsel menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk periode Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada tanggal 3 Maret 2009, Telkomsel mengajukan keberatan dan memohon DJP untuk membatalkan STP tersebut. Pada tanggal 28 April 2009, DJP menolak keberatan yang diajukan. Oleh karena itu pada tanggal 28 Mei 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan DJP. Pada bulan Agustus 2009, Telkomsel membayar sebagian dari denda tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Pada tanggal 21 Desember 2009, Pengadilan Pajak menyetujui permohonan banding Telkomsel dan meminta DJP untuk membatalkan STP (Catatan 51).

Pada tanggal 29 Desember 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp439 miliar. Bagian yang ditolak oleh DJP sebesar Rp3 miliar dibebankan ke dalam laporan laba rugi Konsolidasian tahun 2009. Pada tanggal 28 Januari dan 12 Februari 2010, Telkomsel menerima tagihan atas restitusi pajak untuk tahun fiskal 2008 masing-masing sebesar Rp439 miliar dan Rp4,2 miliar.

g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2009	(Dibebankan dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian)	Akuisisi Ad Medika	31 Maret 2010
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	335.409	(79.107)	-	256.302
Penyisihan piutang ragu-ragu	268.427	26.131	-	294.558
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	160.310	(35.030)	-	125.280
Beban yang masih harus dibayar	36.239	7	-	36.246
Beban Pendi	257.160	(257.160)	-	-
Penyisihan beban karyawan	84.719	28.019	-	112.738
Sewa pembiayaan	18.432	(4.375)	-	14.057
Penyisihan persediaan usang	17.672	835	-	18.507
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.178.368</u>	<u>(320.680)</u>	<u>-</u>	<u>857.688</u>
Kewajiban pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.650.200)	(4.865)	-	(1.655.065)
Hak atas tanah	(5.808)	(264)	-	(6.072)
Pendapatan PBH	(44.596)	(2.610)	-	(47.206)
Aset tidak berwujud	(271.202)	61.438	-	(209.764)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan	<u>(1.971.806)</u>	<u>53.699</u>	<u>-</u>	<u>(1.918.107)</u>
Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(793.438)	(266.981)	-	(1.060.419)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	(2.549.763)	(71.662)	(4.973)	(2.626.398)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih	<u>(3.343.201)</u>	<u>(338.643)</u>	<u>(4.973)</u>	<u>(3.686.817)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	<u>94.953</u>	<u>2.723</u>	<u>-</u>	<u>97.676</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2008	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian*)	31 Maret 2009
Perusahaan			
Aset pajak tangguhan:			
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	698.048	(55.319)	642.729
Penyisihan piutang ragu-ragu	259.195	28.101	287.296
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	275.741	(28.315)	247.426
Beban yang masih harus dibayar	31.877	5.641	37.518
Beban Pendi	220.698	-	220.698
Penyisihan beban karyawan	93.035	23.562	116.597
Sewa pembiayaan	22.034	(1.933)	20.101
Penyisihan persediaan usang	16.201	850	17.051
Jumlah aset pajak tangguhan	1.616.829	(27.413)	1.589.416
Kewajiban pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.570.559)	(42.031)	(1.612.590)
Hak atas tanah	(4.922)	(285)	(5.207)
Pendapatan PBH	(57.869)	(4.057)	(61.926)
Aset tidak berwujud	(573.918)	110.545	(463.373)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan	(2.207.268)	64.172	(2.143.096)
Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(590.439)	36.759	(553.680)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	(2.314.434)	(106.728)	(2.421.162)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih	(2.904.873)	(69.969)	(2.974.842)
Jumlah aset pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	-	76.716	76.716

*Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak (Catatan 38h)

Realisasi dari aset pajak tangguhan tersebut tergantung kepada kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut dipertimbangkan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

Klaim kelebihan pembayaran PPh badan Telkomsel untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 atas perhitungan ulang penyusutan aset tetap untuk keperluan perpajakan pada tahun 2006 sebesar Rp338 miliar tidak disetujui oleh DJP, sehingga Telkomsel melakukan pembalikan sebagian klaim terhadap kewajiban pajak tangguhannya. Penolakan tersebut menyebabkan PPh badan Telkomsel tahun 2006 menjadi lebih bayar Rp12,5 miliar yang merupakan bagian dari pajak dibayar di muka.

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan tiap anak perusahaan melaporkan pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menkumham telah menandatangani dan mengundang Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak Badan sebesar 28% di tahun 2009 (dimana sebelumnya dihitung dengan tarif progresif dari 10% sampai 30%), dan 25% di tahun 2010. Pada tanggal 31 Maret 2009, Perusahaan dan anak perusahaan telah menghitung efek dari perubahan tarif atas perhitungan aset dan kewajiban pajak tangguhnya sesuai dengan estimasi realisasinya.

Selain perubahan tarif, dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 juga diatur pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif tertinggi diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat, yang tercatat dan memperdagangkan sahamnya di BEI yang memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya masing-masing tidak boleh melebihi dari 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kecuali jangka waktu minimum terpenuhinya seluruh kriteria paling singkat 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tujuan perhitungan beban dan kewajiban pajak penghasilan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan periode 31 Maret 2009 dan 2010, Perusahaan tidak memperhitungkan penurunan tarif pajak.

Saat ini, Perusahaan sedang diperiksa pajak untuk tahun fiskal 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Perusahaan telah diperiksa pajak.

Saat ini, Telkomsel sedang diperiksa pajak untuk tahun-tahun fiskal 2006 dan 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Telkomsel telah diperiksa pajak.

Pada tahun 2008, DJP telah mengeluarkan program *sunset policy* berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang bayar dengan imbalan dibebaskan dari sanksi administrasi dan tidak dilakukan pemeriksaan atas tahun fiskal tersebut, kecuali jika ditemukan bukti baru yang mengharuskan DJP melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Perusahaan dan Telkomsel telah memanfaatkan program *sunset policy* tersebut melalui pembetulan SPT. Perusahaan menyeter pajak kurang bayar untuk tahun fiskal 2003, 2005, dan 2006 masing-masing sebesar Rp1,9 miliar, Rp2,8 miliar, dan Rp2,4 miliar, dan Telkomsel untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp1,9 miliar. Selain itu, Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007 dan 2008, kecuali jika Perusahaan melaporkan SPT Lebih Bayar, maka pemeriksaan akan tetap dilakukan.

39. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar masing-masing sejumlah 19.669.424.780 dan 19.748.574.254 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

Laba bersih per saham dasar masing-masing sejumlah Rp141,16 dan Rp124,46 (nilai penuh) untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 22 tertanggal 12 Juni 2009, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2008 sebesar Rp5.840.708 juta atau Rp296,94 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp4.778.761 juta.

Pada tanggal 18 November 2009, Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kas interim tahun buku 2009 sebesar Rp524.190 juta atau Rp26,65 per lembar saham kepada pemegang saham Perusahaan.

41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

	2010	2009
Beban imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar		
Pensiun		
Perusahaan	253.707	662.197
Telkomsel	131.732	105.952
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	385.439	768.149
Imbalan pasca kerja lainnya	218.643	222.379
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	80.724	66.981
Beban imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar	684.806	1.057.509
Beban imbalan pensiun dibayar di muka	614	176
Beban pensiun berkala bersih		
Perusahaan	69.296	118.354
Telkomsel	18.741	13.674
Infomedia	24	2
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	88.061	132.030
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34)	16.469	20.367
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 34)	3.879	3.711

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun

1. Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Imbalan pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp180.946 juta dan Rp222.265 juta.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan yang untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp990 juta dan Rp867 juta.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban imbalan pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada neraca konsolidasian Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 untuk program pensiun imbalan pasti:

	2010	2009
Perubahan kewajiban imbalan pensiun		
Kewajiban imbalan pensiun pada awal tahun	11.753.439	9.516.975
Beban jasa	77.854	56.184
Beban bunga	289.355	278.893
Kontribusi peserta program pensiun	10.211	11.081
(Laba) rugi aktuarial	(693.280)	65.642
Perkiraan pembayaran pensiun	(180.673)	(110.267)
Kewajiban imbalan pensiun pada akhir periode	<u>11.256.906</u>	<u>9.818.508</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	12.300.181	8.713.418
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	321.680	257.707
Kontribusi pemberi kerja	180.946	222.265
Kontribusi peserta program pensiun	10.211	11.081
Laba (rugi) aktuarial	(673.493)	66.398
Perkiraan pembayaran pensiun	(155.146)	(101.308)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>11.984.379</u>	<u>9.169.561</u>
Status pendanaan	727.473	(648.947)
Beban jasa lalu yang belum diakui	1.221.068	1.442.389
Laba aktuarial bersih yang belum diakui	(2.202.248)	(1.455.639)
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	<u>(253.707)</u>	<u>(662.197)</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Pada tahun 2007, Perusahaan memberlakukan *uniformation* imbalan pensiun yang sama bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan imbalan ini berdampak adanya penambahan kewajiban Perusahaan sebesar Rp698.583 juta yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016.

Hasil aktual aset program adalah Rp572.637 juta dan Rp316.975 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

Mutasi beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar selama periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar pada awal tahun	410.209	775.657
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan	69.296	118.354
Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	462	166
Kontribusi pemberi kerja	(180.946)	(222.265)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(45.314)	(9.715)
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar pada akhir periode	253.707	662.197

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, aset program pensiun sebagian besar terdiri dari obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, aset program pensiun termasuk penempatan pada saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan masing-masing dengan nilai wajar Rp300.904 juta dan Rp299.564 juta yang merupakan 2,51% dan 3,27% dari keseluruhan aset program Dapen pada masing-masing periode.

Penilaian aktuarial atas program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41b) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, pada laporan tertanggal 30 Maret 2010 dan 31 Maret 2009 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga ("WWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Towers Watson ("TW") (dahulu Watson Wyatt Worldwide). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Tingkat diskonto	10,75%	12%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	10,5%	11,5%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban jasa	77.854	56.184
Beban bunga	289.355	278.893
Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun	(321.680)	(257.707)
Amortisasi beban jasa lalu	55.330	55.330
Laba aktuarial yang diakui	(31.101)	(14.180)
Beban pensiun berkala bersih	69.758	118.520
Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	(462)	(166)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 34)	69.296	118.354

2. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas imbalan pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah kewajiban yang disajikan di neraca konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Kewajiban imbalan pensiun	(420.755)	(301.332)
Nilai wajar aset program pensiun	154.091	129.239
Yang tidak dilakukan pendanaan	(266.664)	(172.093)
Komponen yang tidak diakui di neraca konsolidasian:		
Beban jasa lalu yang belum diakui	(703)	(766)
Rugi aktuarial bersih yang belum diakui	134.207	65.301
Kewajiban bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal PSAK 24	1.428	1.606
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	(131.732)	(105.952)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

2. Telkomsel (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban jasa	10.877	8.487
Beban bunga	10.478	8.521
Perkiraan pengembalian aset program pensiun	(4.040)	(3.864)
Amortisasi beban jasa lalu	(16)	(16)
Rugi aktuarial yang diakui	1.397	501
Amortisasi kewajiban bersih pada tanggal Penerapan awal PSAK 24	45	45
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	18.741	13.674

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dengan laporan tertanggal masing-masing 8 Februari 2010 dan 12 Februari 2009 yang dilakukan oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Tingkat diskonto	10,5%	12%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	10,5%	12%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	9%

3. Infomedia

Infomedia menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Rekonsiliasi antara status pendanaan program pensiun dengan jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Kewajiban imbalan pensiun	(7.337)	(5.387)
Nilai wajar aset program pensiun	7.951	5.563
Status pendanaan	614	176
Beban imbalan pensiun dibayar di muka	614	176

Beban pensiun berkala bersih Infomedia adalah sebesar Rp24 juta dan Rp2 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 34).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009:

	2010	2009
Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun	209.183	210.345
Beban imbalan pasca kerja lainnya	16.469	20.367
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(7.009)	(8.333)
Total beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir periode	218.643	222.379

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009:

	2010	2009
Beban jasa	4.673	5.432
Beban bunga	8.975	11.540
Amortisasi beban jasa lalu	1.706	1.706
Rugi aktuarial yang diakui	1.115	1.689
Total beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 34)	16.469	20.367

c. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan untuk memberikan imbalan pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp80.724 juta dan Rp66.981 juta. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp3.879 juta dan Rp3.711 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 34).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

42. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” ATAU “LSA”)

Telkomsel

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp209.959 juta dan Rp108.722 juta masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 44). Imbalan yang dibebankan adalah sebesar Rp11.188 juta dan Rp6.855 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 34).

43. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (Yakes”).

Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009:

	2010	2009
Perubahan kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja		
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	7.165.974	5.855.224
Beban jasa	20.980	18.002
Beban bunga	186.138	171.692
Rugi (laba) aktuarial	(27.522)	76.459
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(71.981)	(66.084)
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	7.273.589	6.055.293
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	6.022.263	4.018.693
Perkiraan pengembalian aset program	147.382	102.595
Kontribusi pemberi kerja	180.000	100.084
(Rugi) laba aktuarial	(27.522)	77.297
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(71.981)	(66.084)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	6.250.142	4.232.585
Status pendanaan	(1.023.447)	(1.822.708)
Laba aktuarial bersih yang belum diakui	(658.065)	(730.823)
Total beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar	(1.681.512)	(2.553.531)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Hasil aktual aset program adalah Rp104.342 juta dan Rp55.143 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban jasa	20.980	18.002
Beban bunga	186.138	171.692
Perkiraan pengembalian atas aset program	(147.382)	(102.595)
Laba aktuarial yang diakui	-	(4.204)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	59.736	82.895
Jumlah yang dibebankan ke anak perusahaan berdasarkan perjanjian	-	(84)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 34)	59.736	82.811

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, aset program meliputi saham Seri B yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp77.646 juta dan Rp67.474 juta.

Mutasi beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada awal tahun	1.801.776	2.570.720
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada Unit KSO dan anak perusahaan (Catatan 34)	59.736	82.811
Jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	-	84
Kontribusi pemberi kerja	(180.000)	(100.084)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada akhir periode	1.681.512	2.553.531

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, pada laporan masing-masing tertanggal 30 Maret 2010 dan 31 Maret 2009 oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Tingkat diskonto	10,75%	12%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	9,25%	9,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	10%	12%
Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir	8% 2012	8% 2011

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

a. Pemerintah

- i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah, pemegang saham mayoritas Perusahaan (Catatan 20).

Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp40.850 juta dan Rp66.522 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 8,1% dan 12,9%, dari jumlah beban bunga pada masing-masing periode.

- ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Depkominfo (sebelumnya DPPT).

Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp82.430 juta dan Rp75.248 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 35), yang mencerminkan 0,7% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp907.921 juta dan Rp557.790 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 35), yang mencerminkan 8,1% dan 5,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

Telkomsel membayar *up front fee* untuk lisensi 3G sebesar Rp756.000 juta dan mencatat sebagai aset tidak berwujud (Catatan 13.iii).

- iii. Mulai tahun 2005, Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban Kewajiban Pelayanan Universal kepada Depkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005.

Beban KPU adalah sebesar Rp201.811 juta dan Rp186.148 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 (Catatan 35) yang mencerminkan 1,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

b. Remunerasi Komisaris dan Direktur

- i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp11.460 juta dan Rp10.035 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

- ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp31.220 juta dan Rp28.908 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 0,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat

Perusahaan memperlakukan Indosat sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena Pemerintah masih memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasi Indosat terkait dengan hak untuk menunjuk satu Direktur dan satu Komisaris.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, telex, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (SKDP), televisi, *teleprinter*, *Alternate Voice/Data Telecommunications* (AVD), *hotline*, dan *teleconferencing*.
- ii. Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.
- iii. Pembuatan kuitansi tagihan dan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan.
- iv. Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menhub.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan Sentra Telepon Bergerak Seluler ("*STBS*") Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan STBS milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan STBS Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, dan dapat diberlakukan sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 47). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat (lanjutan)

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan seluler bergerak GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan gerbang pertukaran internasional milik Indosat agar dapat melakukan atau menerima panggilan internasional.
- ii. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dan milik Indosat telah dihubungkan untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan oleh pelanggan dari kedua belah pihak.
- iii. Atas interkoneksi ini, Indosat berhak atas sebagian pendapatan Telkomsel sebagai kompensasi atas jasa interkoneksi.
- iv. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi milik pihak lain tetap merupakan milik pihak pemasang peralatan tersebut. Beban yang timbul sehubungan dengan pengadaan peralatan, pemasangan dan pemeliharaan ditanggung oleh Telkomsel.

Pendapatan interkoneksi bersih Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp225.474 juta dan Rp282.954 juta yang mencerminkan masing-masing 2,0% dan 2,7% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.

Beban interkoneksi bersih Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp257.461 juta dan Rp302.680 juta yang mencerminkan masing-masing 1,6% dan 1,9% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 dan berlaku selama sebelas tahun tersebut, dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp5.561 juta dan Rp8.218 juta yang mencerminkan 0,05% dan 0,08% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

Perjanjian lainnya antara Telkomsel dan Indosat adalah sebagai berikut:

i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta-Surabaya ("*J-S Cable System*")

Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, PT Satelit Palapa Indonesia ("*Satelindo*"), dan Indosat ("*Pihak-pihak*") mengadakan perjanjian pembangunan dan pemeliharaan Sistem Kabel J-S. Pihak-pihak telah membentuk komite manajemen yang terdiri atas seorang ketua dan seorang perwakilan dari setiap pihak yang terkait untuk mengarahkan pembangunan dan operasional sistem kabel. Pembangunan sistem kabel selesai pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Beban operasi dan pemeliharaan dibagi berdasarkan formula yang telah disetujui bersama.

Bagian Telkomsel dalam beban operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp106 juta dan Rp915 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat (lanjutan)

ii. Perjanjian IRU (IRU Agreement)

Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA-ME-WE 3 dan *tail link* di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US\$2,7 juta (Catatan 12). Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US\$0,1 juta.

Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 sementara sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melakukan pembayaran tambahan sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, pembayaran di muka dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai "Uang muka pelanggan dan pemasok".

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan anak perusahaan, yaitu PT Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp34.671 juta dan Rp35.049 juta yang mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.

Lintasarta menggunakan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 sebesar Rp8.761 juta dan Rp6.550 juta yang mencerminkan 0,05% dan kurang dari 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Lintasarta (berlaku sampai dengan 31 Oktober 2010) dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Artajasa") (berlaku sampai dengan bulan Mei 2008) (39,8% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan Indosat) untuk pemakaian sistem jaringan komunikasi data. Beban pemakaian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp9.574 juta dan Rp8.561 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

d. Lain-lain

Transaksi dengan seluruh BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

- (i) Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada Instansi Pemerintah di Indonesia, yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

- (ii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Instansi Pemerintah dan perusahaan asosiasi yaitu CSM, Patrakom, dan PSN untuk penggunaan *transponder* satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp31.187 juta dan Rp40.731 juta yang mencerminkan 0,2% dan 0,3% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.
- (iii) Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada perusahaan asosiasi, yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika. Sirkuit langganan ini dapat digunakan perusahaan asosiasi tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp11.275 juta dan Rp12.271 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.
- (iv) Perusahaan membeli aset tetap termasuk jasa pembangunan dan pemasangan sarana dari sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi, diantaranya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI") dan Kopegtel. Pembelian yang dilakukan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp14.602 juta dan Rp32.260 juta yang mencerminkan 0,1% dan 0,6% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing periode.
- (v) INTI juga merupakan kontraktor dan pemasok utama yang menyediakan peralatan, termasuk jasa konstruksi dan instalasi bagi Telkomsel. Pembelian dari INTI untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp26.055 juta dan Rp24.910 juta yang mencerminkan 0,1% dan 0,5% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing periode.
- (vi) Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 13 Maret 2011. Beban sewa untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp45.058 juta dan Rp60.934 juta yang mencerminkan 0,4% dan 0,6% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.
- (vii) Perusahaan dan anak perusahaan mengasuransikan aset tetap, persediaan, dan menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada Jasindo, PT Asuransi Tenaga Kerja, dan Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp95.327 juta dan Rp75.910 juta yang mencerminkan 0,8% dan 0,7% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.
- (viii) Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Di samping itu, beberapa bank tersebut ditunjuk sebagai agen penagihan Perusahaan. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka, dan reksa dana masing-masing berjumlah Rp5.597.554 juta dan Rp4.829.230 juta pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, yang masing-masing mencerminkan 5,8% dan 5,3% dari jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. Pendapatan bunga yang diakui untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp23.852 juta dan Rp55.676 juta yang mencerminkan 29,9% dan 40,0% dari jumlah pendapatan bunga pada masing-masing periode.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

- (ix) Perusahaan dan anak perusahaan melakukan pinjaman dari beberapa bank milik negara. Beban bunga dari pinjaman tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp238.455 juta dan Rp177.608 juta, yang mencerminkan 47,3% dan 34,3% dari jumlah beban bunga pada masing-masing periode.
- (x) Perusahaan menyewa bangunan, menyewa mobil, membeli barang dan jasa pembangunan, dan menggunakan jasa pemeliharaan dan kebersihan dari Kopegtel dan PT Sandhy Putra Makmur ("SPM"), anak perusahaan dari Yayasan Sandikara Putra Telkom - yayasan yang dikelola oleh Dharma Wanita Telkom. Beban yang timbul dari transaksi tersebut berjumlah Rp97.347 juta dan Rp86.878 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 0,9% dan 0,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.
- (xi) Perusahaan dan anak perusahaan menerima pendapatan interkoneksi bersih dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.271 juta dan Rp1.232 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan kurang dari 0,01% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode. Dan membayar beban interkoneksi bersih dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.306 juta dan Rp1.317 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan kurang dari 0,01% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.
- (xii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kopegtel, sehubungan PBH. Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, bagian dari pendapatan yang harus dibagikan kepada Kopegtel adalah masing-masing sebesar Rp166 juta dan Rp1.628 juta, yang mencerminkan kurang dari 0,01% dan 0,01% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing periode.
- (xiii) Telkomsel mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Patrakom dan CSM sehubungan dengan penggunaan jaringan transmisi mereka untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Beban sewa untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp50.952 juta dan Rp64.253 juta, yang mencerminkan 0,5% dan 0,6% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.
- (xiv) Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel") adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan mobil, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Untuk jasa-jasa ini, Kisel membebankan Telkomsel masing-masing Rp168.720 juta dan Rp121.124 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 1,5% dan 1,2% dari beban usaha pada masing-masing periode. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penyaluran dengan Kisel untuk pendistribusian kartu SIM dan vauzer pulsa isi ulang. Jumlah kartu SIM dan vauzer pulsa isi ulang yang dijual ke Kisel sebesar Rp539.135 juta dan Rp525.361 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 3,3% dan 3,4% dari pendapatan usaha pada masing-masing periode.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

- (xv) Telkomsel mengadakan perjanjian pengadaan dengan Gratika, yang merupakan anak perusahaan dari Dapen untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan. Jumlah pengadaan untuk pemasangan peralatan sebesar Rp7.743 juta dan Rp38.248 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 0,04% dan 0,8% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing periode. Jumlah pengadaan untuk pemeliharaan peralatan sebesar Rp7.000 juta dan Rp9.376 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009, yang mencerminkan 0,06% dan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

Saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2010		2009	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 4)	4.985.354	5,16	4.269.004	4,67
b. Penyertaan sementara	295.350	0,31	287.531	0,31
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	849.181	0,88	770.121	0,84
d. Piutang lain-lain				
Patrakom	4.692	0,00	4.725	0,01
Bank milik negara (bunga)	4.129	0,00	-	-
Kopegstel	3.831	0,00	3.827	0,00
Instansi Pemerintah	196	0,00	2.442	0,00
Lainnya	269	0,00	425	0,00
Jumlah	13.117	0,00	11.419	0,01
e. Beban dibayar di muka (Catatan 7)	1.870.292	1,94	1.284.159	1,41
f. Aset lancar lainnya (Catatan 8)				
BNI	49.611	0,05	21.232	0,02
Bank Mandiri	2.541	0,00	21.169	0,02
BRI	347	0,00	-	-
Jumlah	52.499	0,05	42.401	0,04
g. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 12)				
Bank Mandiri	124.524	0,13	91.198	0,10
BNI	96.511	0,10	94.039	0,10
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	813	0,00	813	0,00
Kisef	-	-	1.088	0,00
BRI	-	-	347	0,00
Jumlah	221.848	0,23	187.485	0,20
h. Rekening escrow (Catatan 14)	42.503	0,04	42.811	0,05

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	2010		2009	
	Jumlah	% terhadap jumlah kewajiban	Jumlah	% terhadap jumlah kewajiban
i. Hutang usaha (Catatan 15)				
Instansi Pemerintah	990.140	2,31	847.774	1,93
Yakes	81.529	0,19	9.588	0,02
Kopegtel	70.944	0,17	62.898	0,14
PSN	34.330	0,08	-	-
Indosat	32.564	0,08	24.492	0,06
SPM	9.205	0,02	7.377	0,02
Gratika	5.370	0,01	3.955	0,01
Patrakom	704	0,00	-	-
INTI	438	0,00	6.916	0,02
CSM	-	-	1.012	0,00
Lain-lain	264.640	0,62	274.101	0,62
Jumlah	1.489.864	3,48	1.238.113	2,82
j. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 16)				
Karyawan	904.082	2,11	1.128.243	2,56
Instansi Pemerintah dan bank milik negara	76.757	0,18	85.694	0,19
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)	25.547	0,06	21.032	0,05
Jasindo	-	-	93	0,00
Jumlah	1.006.386	2,35	1.235.062	2,80
k. Hutang bank jangka pendek (Catatan 18)				
BSM	10.500	0,02	-	-
l. Kewajiban LSA (Catatan 42)	209.959	0,49	108.722	0,25
m. Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja (Catatan 43)	1.681.512	3,93	2.553.531	5,80
n. Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 41)	684.805	1,60	1.057.509	2,40
o. Pinjaman penerusan (Catatan 20)	3.292.197	7,69	4.347.468	9,88
p. Wesel bayar (Catatan 21)	105.000	0,25	-	-
q. Hutang bank jangka panjang (Catatan 22)				
BNI	3.900.000	9,11	3.450.000	7,84
BRI	3.348.611	7,82	3.060.000	6,96
Bank Mandiri	2.707.778	6,32	2.030.000	4,61
BTN	8.534	0,02	-	-
Jumlah	9.964.923	23,27	8.540.000	19,41

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki tiga segmen usaha utama yang seluruhnya beroperasi di Indonesia, yaitu sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, dan seluler. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal, SLJJ, dan internasional, dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkuit langganan, teleks, *transponder*, satelit, dan VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan jasa telekomunikasi berbasis CDMA yang menawarkan pelanggannya kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan area terbatas (dalam kode wilayah lokal). Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi seluler bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan disajikan sebagai "Lain-lain", yang terdiri dari usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. *Goodwill* dialokasikan pada segmen sambungan kabel tidak bergerak.

Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2010						Jumlah konsolidasian
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	
Hasil segmen							
Pendapatan usaha eksternal	5.199.597	788.272	10.565.837	33.616	16.587.322	-	16.587.322
Pendapatan antar segmen	1.248.212	9.345	450.799	92.172	1.800.528	(1.800.528)	-
Jumlah pendapatan segmen	6.447.809	797.617	11.016.636	125.788	18.387.850	(1.800.528)	16.587.322
Beban usaha eksternal	(4.336.412)	(785.547)	(5.974.751)	(168.855)	(11.265.565)	-	(11.265.565)
Beban usaha antar segmen	(856.917)	-	(1.002.292)	(8.274)	(1.867.483)	1.867.483	-
Beban usaha segmen	(5.193.329)	(785.547)	(6.977.043)	(177.129)	(13.133.048)	1.867.483	(11.265.565)
Hasil segmen	1.254.480	12.070	4.039.593	(51.341)	5.254.802	66.955	5.321.757
Beban bunga							(504.235)
Pendapatan bunga							79.674
Kerugian selisih kurs - bersih							164.054
Penghasilan lain-lain - bersih							77.261
Beban PPh							(1.372.379)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi							437
Laba sebelum hak minoritas							3.766.569
Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi							(989.979)
Laba bersih							2.776.590
Informasi lain							
Aset segmen	33.734.013	5.484.502	58.877.194	805.823	98.901.532	(2.523.229)	96.378.303
Investasi pada perusahaan asosiasi	135.535	-	20.359	-	155.894	-	155.894
Jumlah aset konsolidasian							96.534.197
Jumlah kewajiban konsolidasian	(18.322.880)	(1.676.064)	(25.014.602)	(328.568)	(45.342.114)	2.523.229	(42.818.885)
Pembelian barang modal	(574.833)	(746)	(2.071.416)	(5.038)	(2.652.033)	-	(2.652.033)
Penyusutan dan amortisasi	(831.667)	(183.674)	(2.336.347)	(7.608)	(3.359.296)	-	(3.359.296)
Amortisasi <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud lainnya	(321.752)	(1.867)	(44.017)	(42)	(367.678)	-	(367.678)
Beban non-kas lain-lain	(118.142)	-	(29.147)	(2.929)	(150.218)	-	(150.218)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2009						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan usaha eksternal	5.170.418	744.413	9.655.288	48.186	15.618.305	-	15.618.305
Pendapatan antar segmen	1.044.102	17.819	423.798	81.365	1.567.084	(1.567.084)	-
Jumlah pendapatan segmen	6.214.520	762.232	10.079.086	129.551	17.185.389	(1.567.084)	15.618.305
Beban usaha eksternal	(4.447.164)	(586.380)	(5.140.929)	(155.634)	(10.330.107)	-	(10.330.107)
Beban usaha antar segmen	(592.067)	-	(1.020.942)	(9.006)	(1.622.015)	1.622.015	-
Beban usaha segmen	(5.039.231)	(586.380)	(6.161.871)	(164.640)	(11.952.122)	1.622.015	(10.330.107)
Hasil segmen	1.175.289	175.852	3.917.215	(35.089)	5.233.267	54.931	5.288.198
Beban bunga							(517.388)
Pendapatan bunga							138.451
Kerugian selisih kurs - bersih							(211.718)
Penghasilan lain-lain - bersih							56.371
Beban PPh							(1.398.863)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi							931
Laba sebelum hak minoritas							3.355.982
Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi							(898.098)
Laba bersih							2.457.884
Informasi lain							
Aset segmen	30.909.659	8.152.772	53.222.294	747.301	93.032.026	(1.832.724)	91.199.302
Investasi pada perusahaan asosiasi	149.825	-	20.359	-	170.184	-	170.184
Jumlah aset konsolidasian							91.369.486
Jumlah kewajiban konsolidasian	(19.297.231)	(2.565.550)	(23.635.051)	(329.877)	(45.827.709)	1.832.724	(43.994.985)
Pembelian barang modal	(893.119)	(448.634)	(2.156.983)	(4.385)	(3.503.121)	-	(3.503.121)
Penyusutan dan amortisasi	(874.021)	(140.878)	(1.940.513)	(13.841)	(2.969.253)	-	(2.969.253)
Amortisasi goodwill dan aset tidak berwujud lainnya	(289.623)	-	(27.065)	-	(316.688)	-	(316.688)
Beban non-kas lain-lain	(99.865)	-	(24.840)	(1.586)	(126.291)	-	(126.291)

46. POLA BAGI HASIL ("PBH")

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait.

Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan memiliki 24 perjanjian PBH dengan 22 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Pekanbaru, Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 68 sampai dengan 172 bulan.

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

46. POLA BAGI HASIL ("PBH") (lanjutan)

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya pemasangan sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon *outgoing* dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati.

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan amandemen atas beberapa perjanjian PBH dengan memperpanjang periode PBH serta rasio PBH antara Perusahaan dengan mitra usaha. Nilai buku bersih aset tetap PBH yang telah dialihkan menjadi aset tetap yang dimiliki sendiri pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp4.418 juta dan Rp nihil (Catatan 11).

Pendapatan yang menjadi bagian mitra usaha adalah sebesar Rp29.026 juta dan Rp41.905 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009.

47. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap.

Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan

Berdasarkan Peraturan tersebut, Perusahaan menyesuaikan tarif yang berlaku sejak 1 Agustus 2008 sebagai berikut:

- Tarif lokal mengalami penurunan berkisar dari 2,5% hingga kenaikan 8,9%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan
- Tarif SLJJ mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 36,9% hingga kenaikan rata-rata 13,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan
- Tarif SMS mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 42,8% hingga 49,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan

b. Tarif telepon seluler

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon seluler (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa tarif seluler terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
 - Tarif jelajah
 - Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari :

- Perhitungan biaya elemen jaringan (*network element cost*);
- Perhitungan biaya aktivitas layanan retail ditambah margin (*retail services activity cost plus margin*).

Biaya elemen jaringan dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost (LRIC) Bottom Up*. Penyelenggara dapat melakukan *de-average* biaya penggunaan jasa teleponi dasar dan menerapkan sistem pentarifan *bundling*, tidak melebihi jumlah dari tarif pungut dihitung dengan menggunakan metode tersebut di atas.

c. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Tarif interkoneksi Perusahaan dan anak perusahaan yang berlaku saat ini, berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") terbaru yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 205 tahun 2008 tanggal 11 April 2008, yang berlaku untuk periode satu tahun, tentang persetujuan terhadap DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*Operating Revenues*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, adalah sebagai berikut :

(1) Sambungan tidak bergerak

- a. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap lokal sebesar Rp73/menit.
- b. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan lokal) sebesar Rp73/menit.
- c. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan jarak jauh) sebesar Rp203/menit.
- d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan tetap domestik sebesar Rp560/menit.
- e. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp203/menit.
- f. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp204/menit.
- g. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp626/menit.
- h. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp613/menit.
- i. Tarif layanan terminasi domestik dari jaringan internasional sebesar Rp612/menit.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

(1) *Sambungan tidak bergerak* (lanjutan)

- j. Tarif layanan originasi internasional dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jaringan tetap internasional sebesar Rp612/menit
- k. Tarif layanan originasi lokal untuk panggilan jarak jauh dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp203/menit.
- l. Tarif layanan transit lokal sebesar Rp69/menit.
- m. Tarif layanan transit jarak jauh sebesar Rp295/menit.
- n. Tarif layanan transit internasional sebesar Rp316/menit.

(2) *Seluler*

- a. Tarif layanan terminasi lokal dan originasi lokal sebesar Rp261/menit.
- b. Tarif layanan terminasi jarak jauh dan originasi jarak jauh sebesar Rp380/menit.
- c. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp493/menit.
- d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan satelit sebesar Rp501/menit.
- e. Tarif layanan terminasi internasional dan originasi internasional sebesar Rp498/menit.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, penyelesaian DPI baru masih dalam proses.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 25 Februari 2009, interkoneksi antar operator diselesaikan melalui proses kliring trafik telekomunikasi. Fungsi kliring ditangani secara bersama-sama oleh operator-operator dibawah pengawasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 2 Maret 2009, 12 penyelenggara telekomunikasi dan PT Pratama Jaringan Nusantara ("PJN") menandatangani perjanjian pengoperasian Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT"). PJN ditetapkan untuk mengadakan proses kliring interkoneksi suara dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tarif sebesar Rp0,4 per data percakapan (*call data record*),
- Untuk mendukung proses tersebut, PJN harus menyediakan SKTT dalam jangka waktu 6 bulan.

Perjanjian tersebut berlaku selama sepuluh tahun, dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak atau dapat dihentikan sebelum periode tersebut, tergantung pada antara lain, kemampuan PJN untuk:

- Menyediakan sistem dalam periode yang disebutkan di atas,
- Mengubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu satu bulan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengoperasian kliring interkoneksi suara sedang dalam tahap persiapan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

d. Tarif interkoneksi VoIP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menhub No. KM. 23 tahun 2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan VoIP harus disepakati antara operator jaringan dan operator VoIP. Pada tanggal 11 Maret 2004, Menhub menerbitkan Keputusan No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk VoIP akan ditetapkan oleh Menhub. Saat ini, Menkominfo belum menetapkan tarif beban interkoneksi VoIP yang baru. Sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru tersebut, Perusahaan masih akan tetap menerima jumlah per menit yang telah disepakati untuk panggilan yang berasal dari atau diakhiri di jaringan sambungan tidak bergerak milik Perusahaan.

e. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Kepdirjen Postel No. 115/Dirjen/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

Perusahaan mengeluarkan tarif sewa jaringan yang mulai berlaku tanggal 21 Januari 2010, berupa:

- Besaran biaya aktivasi sewa jaringan mulai Rp2.400.000.
- Besaran tarif pemakaian bulanan untuk *end to end* lokal (di bawah 25km) bervariasi mulai Rp3.800.000 hingga Rp74.400.000 tergantung pada besaran kapasitas, untuk pemakaian bulanan *end to end* jarak jauh (di atas 25 km) mulai Rp7.100.000 hingga Rp519.700.000 tergantung pada kapasitas.
- Besaran tarif pemakaian bulanan untuk *point to point* lokal (di bawah 25 km) bervariasi mulai Rp1.500.000 hingga Rp37.200.000 tergantung pada besaran kapasitas, untuk pemakaian bulanan *point to point* jarak jauh (di atas 25km) mulai Rp4.800.000 hingga Rp482.500.000 tergantung kapasitas.

f. Tarif warung telekomunikasi (“wartel”)

Menhub menerbitkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 mengenai penyelenggaraan wartel yang digantikan oleh Peraturan Menkominfo No. PM.05/PER/M.KOMINFO/1/2006 tanggal 30 Januari 2006 dimana Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional. Keputusan ini juga menentukan bahwa *airtime* dari operator seluler harus memberikan minimum 10% untuk pendapatan wartel.

g. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya. Pada tanggal 1 April 2009, Perusahaan menurunkan tarif internet rata-rata 20% tergantung paket berlangganan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

47. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

h. Kewajiban Pelayanan Universal (“KPU”)

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban koneksi).

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 yang telah diamandemen dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/Per/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (“BTIP”) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006.

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz-2.400 MHz.

Selanjutnya, perjanjian telah diubah. Perubahan terakhir pada tanggal 29 Desember 2009, meliputi, antara lain:

- Relokasi dan tambahan lokasi tertentu,
- Perubahan harga menjadi Rp1,76 triliun,
- Memperpanjang periode pra-operasi menjadi 31 Januari 2010 dan 28 Februari 2010, dan periode operasi menjadi Maret dan April 2014.

Pada tanggal 18 Februari 2009 dan 16 Maret 2009, berdasarkan pada Keputusan No. 62/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Keputusan No. 88/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 16 Maret 2009, Menkominfo memberikan Telkomsel izin prinsip untuk mengoperasikan jaringan tidak bergerak di area cakupan Program KPU yang bergantung uji layak operasi dalam jangka waktu 6 bulan. Izin ini dapat diperpanjang untuk tiga bulan berdasarkan evaluasi dari DJPT. Telkomsel telah mendapatkan sertifikat layak operasi untuk paket 1,3, dan 6. Uji layak operasi untuk paket 2 dan 7 telah selesai. Pada tanggal 22 Januari 2010, Telkomsel memperoleh sertifikat layak operasi untuk paket 2 dan 7. Selanjutnya, masing-masing pada tanggal 25 Januari 2010 dan 28 Januari 2010, berdasarkan Keputusan No 39/KEP/M.KOMINFO/01/2010 dan No 41/KEP/M.KOMINFO/01/2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi untuk menyediakan jaringan tetap lokal dalam program KPU di daerah-daerah yang dicakup oleh perjanjian antara Telkomsel dan BTIP. Lisensi berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian, dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Maret 2010, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	3.502.365
Dolar A.S.	474	4.315.309
Euro	4	49.595
Jumlah		7.867.269

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) *Perusahaan*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian	Jumlah nilai Kontrak	Nilai ikatan pada tanggal 31 Maret 2010
Perusahaan dan Konsorsium ZTE	28 November 2006 10 Juli 2007	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN di: a. Divre VI (Kalimantan) b. Divre VII (Sulawesi, Maluku, dan Papua)	US\$14,9 juta dan Rp28.075 juta US\$15,6 juta dan Rp20.932 juta	US\$0,17 juta dan Rp122 juta US\$0,2 juta dan Rp181 juta
Perusahaan dan Konsorsium Huawei ("Huawei")	28 September 2007	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy Access paket-3	US\$19,2 juta dan Rp130.774 juta	Rp740 juta
Perusahaan dan Huawei Tech	31 Maret 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-3 di Divre V	Rp103.376 juta	Rp1.271 juta
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber Optik</i> 2008 paket-8 Divre VII	Rp116.340 juta	Rp5.729 juta
Perusahaan dan PT Konsorsium Jembo-Karteksi-Tridayasa	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber Optik</i> 2008 paket-9 Netre Sumbagut Area	Rp216.647 juta	Rp66.870 juta
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber Optik</i> 2008 paket-10 Netre Sumbagsel Area	Rp79.337 juta	Rp21.205 juta
Perusahaan dan Telekomindo	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber Optik</i> 2008 paket-11 Netre Sumbagsel	Rp128.942 juta	Rp10.350 juta
Perusahaan dan PT Brimbun Raya Indah ("Brimbun")	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber Optik</i> paket-12 Netre Jakarta dan Jawa Barat	Rp144.919 juta	Rp7.538 juta
Perusahaan dan Huawei	12 Mei 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN di Divisi Divre I, II, III dan IV	US\$134 juta dan Rp542.013 juta	US\$1,7 juta dan Rp4.568 juta

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) *Perusahaan* (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian	Jumlah nilai kontrak	Nilai ikatan pada tanggal 31 Maret 2010
Perusahaan dan PT Nokia Siemens Networks	5 Desember 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Softswitch</i> dan MSAN Modernisasi Divre V dan lokasi <i>trial</i> Bali dan Timika	Rp71.327 juta	Rp6.433 juta
Perusahaan dan Konsorsium NSW-Fujitsu	30 Desember 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Kapasitas <i>Ring</i> Proyek JaKa2LaDeMa	US\$117,2 juta	US\$74,7 juta
Perusahaan dan ISS Reshetnev	2 Maret 2009	Perjanjian Pengadaan Satelit Telkom-3	US\$178,9 juta	US\$129,3 juta
Perusahaan dan APT Satellite Company Limited	23 Maret 2009	Perjanjian Kerjasama Posisi Orbit 142E Derajat (<i>142E Degree Orbital Position Cooperation Agreement</i>)	US\$18,5 juta	US\$13,3 juta
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei ("Sansaine Huawei")	27 Mei 2009	a. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-3	US\$5,9 juta dan Rp66.287 juta	US\$4,8 juta dan Rp50.844 juta
	15 Juni 2009	b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-1	US\$5,7 juta dan Rp53.730 juta	US\$4,96 juta dan Rp43.688 juta
Perusahaan dan Konsorsium ZTE	2 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-2	US\$7,8 juta dan Rp43.137 juta	US\$4,2 juta dan Rp11.327 juta
Perusahaan dan PT Aldomaru	11 Juni 2009	Perjanjian Pengadaan Roll Out Infusion PL 2009	Rp63.761 juta	Rp34.272 juta
Perusahaan dan PT Dharma Kumala Utama	29 Juli 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan & Pemasangan Kabel Serat Optik Akses & RMJ Tahun 2009 Lokasi Jawa Tengah & Jawa Timur Paket-1	Rp64.198 juta	Rp47.696 juta
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	3 Agustus 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan <i>Softswitch</i> dan MSAN Modernisasi Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV	US\$13,3 juta dan Rp23.239 juta	US\$6,8 juta dan Rp13.921 juta
Perusahaan dan Sansaine Huawei	24 November 2009	Kontrak untuk Pengadaan & Pemasangan Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project (MKCS)	US\$52,3 juta dan Rp114.949 juta	US\$52,3 juta dan Rp114.949 juta
Perusahaan dan Konsorsium NEC - NSN	16 Desember 2009	Perjanjian Kerjasama untuk Pengadaan & Pemasangan Perluasan Kapasitas Ring JASUKA Backbone 2009	US\$5,7 juta dan Rp85.441 juta	US\$1,97 juta dan Rp85.441 juta
Perusahaan dan ZTE	21 Desember 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan & Pemasangan Improvement & Upgrade Jawa Backbone 2009	Rp55.950 juta	Rp34.122 juta

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Motorola, Inc. dan PT Motorola Indonesia, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia, Nokia Corporation dan PT Nokia Network ("Nokia Network"), dan Siemens AG sejak Agustus 2004, untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta jasa terkait yang terdiri dari:

- Perjanjian Perencanaan dan Pengerjaan Bersama (*Joint Planning and Process Agreement*)
- Perjanjian Penyediaan Peralatan ("*Equipment Supply Agreement*" atau "ESA")
- Perjanjian Jasa Teknik ("*Technical Service Agreement*" atau "TSA")
- Perjanjian Pengadaan Lokasi dan Rekayasa, Mekanik dan Sipil ("*Site Acquisition and Civil, Mechanical and Engineering Agreement*" atau "SITAC" dan "CME")

Perjanjian tersebut berisi daftar harga yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kewajiban Telkomsel untuk seluruh peralatan dan jasa-jasa terkait selama masa perjanjian, berdasarkan penerbitan *Purchase Orders* ("PO").

Perjanjian tersebut berlaku valid dan efektif untuk 3 tahun sejak penandatanganan, dengan ketentuan bahwa para pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Bila para pemasok gagal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Telkomsel dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak juga setuju bahwa biaya yang disebutkan dalam daftar harga juga akan berlaku untuk pengadaan peralatan dan jasa (ESA dan TSA) dan jasa (SITAC dan CME) yang diperoleh dari para pemasok antara tanggal 26 Mei 2004 dan tanggal efektif, kecuali untuk peralatan dan jasa yang diperoleh dari Siemens dengan TSA terkait dengan peralatan dan jasa pemeliharaan *Switching Sub System* ("SSS") dan BSS Telkomsel yang diperoleh antara tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal efektif. Harga akan ditinjau ulang secara kuartalan.

Pada bulan Agustus 2007, disebabkan oleh telah berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut di atas, berdasarkan surat dari Ericsson AB dan Ericsson Indonesia dan Nokia Siemens Network (yang saat ini mewakili Nokia Corporation, Nokia Network, dan Siemens AG), perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui untuk:

- memperpanjang masa berlakunya perjanjian tersebut di atas sampai dengan perjanjian yang baru antara Telkomsel dan perusahaan-perusahaan lainnya ini telah dibuat dan
- sebelum tanggal berlakunya perjanjian yang baru secara efektif, secara retroaktif berlaku harga berdasarkan perjanjian yang baru (penyesuaian harga retroaktif) terhadap PO untuk pengadaan peralatan dan jasa BSS yang dikeluarkan oleh Telkomsel setelah 1 Juli 2007 dengan menggunakan daftar harga sebelumnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG menandatangani perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*). Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya (17 April 2008, kecuali untuk beberapa PO tertentu yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2007 yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2007); atau
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Untuk penyediaan jasa telekomunikasi berteknologi 3G, pada bulan September dan Oktober 2006, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Nokia Corporation dan Nokia Network, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia; serta Siemens Network GmbH & Co. KG, untuk pembangunan jaringan (*Rollout Agreement*) dan Nokia Network, Ericsson Indonesia dan Siemens Network GmbH & Co. KG untuk perawatan dan pengoperasian jaringan (*Managed Operations Agreement and Technical Support Agreement*). Perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat tanggal pelaksanaan oleh semua pihak terkait (tanggal efektif) sampai dengan tanggal yang paling akhir antara 31 Desember 2008 atau tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum 31 Desember 2008, dengan ketentuan bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Berdasarkan surat dari Telkomsel, Perjanjian Perawatan dan Pengoperasian dengan perusahaan-perusahaan tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.

Pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks menandatangani TSA untuk dukungan teknik untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network*). Perjanjian ini dimulai pada saat:

- berkaitan hanya dengan proyek bulan Agustus 2007 saja, pada tanggal jasa pengalihan (*transition-out*) telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Pengoperasian Jaringan 3G (*3G Managed Operations Agreement*);
- untuk proyek-proyek yang lain, pada Tanggal Efektif;

dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada bulan Juli dan Agustus 2008, Telkomsel mengadakan perjanjian uji-coba jaringan (*Network Trial Agreements* atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan PT Alcatel-Lucent Indonesia ("Alcatel"), ZTE, dan Huawei Tech sebagai peserta uji-coba ("*Trial Participants*"). Selanjutnya, pada September 2008, perjanjian dengan ZTE dan Huawei Tech telah diperpanjang. Perjanjian tersebut antara lain berisi:

- Penyediaan rancangan, pasokan, pengiriman, pemasangan, integrasi, dan pengawasan pelaksanaan dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS *radio access network* dan jasa teknik untuk penyediaan sub-sistem dan jaringan tersebut oleh peserta uji-coba.
- Berdasarkan keputusan Telkomsel, peserta uji-coba harus mengalihkan kepemilikan kepada Telkomsel atas 2G GSM BSS dan 3G UMTS *radio access network* tertentu.

Pada bulan Maret dan Juni 2009, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Indonesia, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International, Huawei Tech, dan ZTE menandatangani perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN *Rollout (2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements)* sebagai provisi dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS *Radio Access Network*.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemasok harus menyediakan peralatan dan jasa terkait, termasuk antara lain:

- berpartisipasi dalam proses Perencanaan Bersama (*Joint Planning*),
- menyediakan Pekerjaan SITAC dan CME,
- menyediakan Lisensi peranti lunak.

Provisi peralatan dan jasa harus selaras dengan perjanjian lain seperti perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*) tanggal 17 April 2008.

Selama berlakunya perjanjian tersebut, pemasok (kecuali Huawei International, Huawei Tech, dan ZTE) setuju untuk menyediakan vaučer, peralatan gratis, dan insentif komersial lainnya pada Telkomsel. Sebagian dari vaučer sebesar US\$107,5 juta (setara dengan Rp1.172 miliar), disediakan pemasok sebagai penyesuaian harga yang tercantum dalam PO yang terbit sejak 1 Juli 2007.

Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode sampai dengan 12 bulan.

Sehubungan dengan berakhirnya periode uji coba (*Network Trial Agreements* atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan Alcatel, berdasarkan pada Perjanjian Penyelesaian pada tanggal 5 Februari 2010, Telkomsel setuju untuk memberikan kompensasi pada Alcatel sebesar US\$7,2 juta (setara dengan Rp67,68 miliar) dan Rp18,4 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 3 Februari 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait:

- *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support* dengan PT Packet Systems Indonesia dan Huawei Tech; dan
- *Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support* dengan PT Datacraft Indonesia dan Huawei Tech.

Perjanjian dimulai pada saat tanggal efektif dan dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode tidak lebih dari dua tahun.

Pada tanggal 8 Februari 2010, Telkomsel menandatangani Perjanjian *Online Charging System and Service Control Points System Solution Development* dengan Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions.

Perjanjian dimulai pada saat tanggal efektif dan dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

- lima tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode lima tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode tidak lebih dari tiga tahun.

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi, fasilitas *standby letter of credit*, dan fasilitas nilai tukar mata uang asing sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2010. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20.000 juta (setara dengan US\$2,19 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 48c.i). Pinjaman yang berasal dari fasilitas ini dikenakan tingkat bunga *Singapore Interbank Offered Rate* ("SIBOR") ditambah 1,25% per tahun (US\$). Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, tidak ada saldo pinjaman terutang atas fasilitas tersebut.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, (Catatan 1d.a dan 2j), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun). BHP untuk tahun kelima untuk perolehan lisensi pertama dibayar pada bulan Februari 2010 dan tahun pertama untuk lisensi tambahan pada bulan September 2009 (Catatan 13iii). Komitmen yang timbul dari BHP pada tanggal 31 Maret 2010 dan sampai dengan berakhirnya lisensi dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut:

Tahun	Kurs BI (%)	Indeks (pengali)	Tarif penggunaan frekuensi radio	
			Lisensi sebelumnya	Lisensi tambahan
1	-	-	20% x HL	100% x HL
2	R1	$I1 = (1 + R1)$	40% x I1 x HL	100% x I1 x HL
3	R2	$I2 = I1(1 + R2)$	60% x I2 x HL	100% x I2 x HL
4	R3	$I3 = I2(1 + R3)$	100% x I3 x HL	100% x I3 x HL
5	R4	$I4 = I3(1 + R4)$	130% x I4 x HL	100% x I4 x HL
6	R5	$I5 = I4(1 + R5)$	130% x I5 x HL	100% x I5 x HL
7	R6	$I6 = I5(1 + R6)$	130% x I6 x HL	100% x I6 x HL
8	R7	$I7 = I6(1 + R7)$	130% x I7 x HL	100% x I7 x HL
9	R8	$I8 = I7(1 + R8)$	130% x I8 x HL	100% x I8 x HL
10	R9	$I9 = I8(1 + R9)$	130% x I9 x HL	100% x I9 x HL

Catatan:

Ri = tingkat bunga rata-rata BI tahun sebelumnya

Harga Lelang (HL) = Rp160.000 juta

Indeks = penyesuaian atas harga tender untuk periode berjalan

BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT.

2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.
3. Berkontribusi pada pengembangan Kewajiban Pelayanan Universal.
4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah provinsi berikut:

Tahun	Jumlah minimum provinsi
1	2
2	5
3	8
4	10
5	12
6	14

5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20.000 juta atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya. *Performance bond* ini akan dicairkan oleh Pemerintah jika Telkomsel tidak mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas atau saat lisensi dibatalkan atau berakhir, atau jika Telkomsel memutuskan untuk mengembalikan lisensi secara sukarela.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

48. IKATAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Konsorsium Palapa Ring

Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan masuk kedalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangani C&MA dengan 5 perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibuat untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal sekitar Rp2.070.336 juta. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh *bandwidth* sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda (Catatan 14). Pada tahun 2008, 2 perusahaan mengundurkan diri, sehingga jumlah anggota Konsorsium Palapa Ring menjadi 4 termasuk Perusahaan.

(iii) Pemakaian frekuensi radio

Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPT untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 48c.i). Biaya pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah *carrier* ("TX") untuk Telkom dan *transceivers* ("TRXs") untuk Telkomsel yang terdaftar dari stasiun radio. Biaya untuk tahun 2010 akan ditentukan berdasarkan 46.763 TX dalam operasi pada tanggal 31 Maret 2010, dengan biaya berkisar dari Rp0,07 juta hingga Rp17,55 juta untuk tiap TX dan berdasarkan 306.411 TRXs dalam operasi pada tanggal 31 Maret 2010, dengan biaya berkisar dari Rp3,40 juta hingga Rp15,90 juta untuk tiap TRX (Catatan 7).

(iv) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE), serta penyediaan layanan jaringannya. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 125.000, 300.000, dan 500.000 unit.

(v) Sewa Operasi

	Pembayaran sewa minimum			
	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sewa operasi	278.302	65.850	187.009	25.443

Sewa operasi merupakan perjanjian sewa kantor beberapa anak perusahaan yang tidak dapat dibatalkan.

49. KONTINJENSI

- a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan mencadangkan sebesar Rp95.081 juta pada tanggal 31 Maret 2010.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

- b. Pada tanggal 2 Januari 2006, Kantor Kejaksaan Agung mengadakan suatu pemeriksaan terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dalam hubungannya dengan penyediaan jasa VoIP, dimana satu mantan karyawan dan empat karyawan Perusahaan di KSO VII dijadikan tersangka. Hasil dari pemeriksaan tersebut, satu mantan karyawan dan dua karyawan Perusahaan didakwa di Pengadilan Negeri Makassar, dan dua karyawan lainnya didakwa di Pengadilan Negeri Denpasar untuk pelanggaran korupsi yang mereka lakukan di KSO VII.

Pada tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi kepada MA terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan masing-masing tersangka hukuman berupa penjara selama satu tahun enam bulan dan satu tahun serta denda masing-masing Rp50 juta. Para terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Bali terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 5 November 2008, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa para terdakwa bersalah. Pada tanggal 16 Januari 2009, salah seorang terdakwa di Pengadilan Tinggi Bali mengajukan kasasi ke MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan kasasi atas kedua kasasi tersebut.

- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") melalui suratnya tanggal 5 Desember 2007, memberitahukan Telkomsel bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 berkaitan dengan transaksi kepemilikan silang oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli oleh Telkomsel, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan antara lain:
- Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut,
 - Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut,
 - Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 5%,
 - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.
 - Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp25.000 juta dan memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif paling sedikit sebesar 15% dari tarif yang berlaku.

Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri telah mengumumkan keputusannya dan menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

- Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut,
- Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut,
- Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel atau mengurangi kepemilikannya menjadi 50% pada masing-masing perusahaan dalam batas waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan ini telah menjadi final dan mengikat secara hukum syarat-syarat sebagai berikut:
 - Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 10%,
 - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.
- Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp15 miliar,
- Pengadilan Negeri tidak menyetujui keputusan KPPU mengenai perintah untuk menurunkan tarif tersebut karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tersebut.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

49. KONTINJENSI (lanjutan)

c. (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2008, Telkomsel telah mengajukan kasasi kepada MA. Pada tanggal 9 September 2008, MA mencabut keputusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel. Pada tanggal 14 Mei 2009, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali ke MA atas keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas peninjauan kembali tersebut.

- d. Pelanggan tertentu Telkomsel, Indosat, dan PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama) yang berdomisili di Bekasi, Tangerang, dan berbagai wilayah lainnya, yang diwakili oleh Penasehat Hukum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) ke pengadilan untuk menggugat Telkomsel, Perusahaan, Indosat, Pemerintah, Temasek Holdings, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya ("Para Pihak"). Para pihak digugat melakukan praktik pengenaan tarif tinggi yang berpotensi merugikan para pelanggan tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2008, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk menggugat Telkomsel oleh beberapa pelanggan tertentu, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup.

Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan keputusan pengadilan, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) di Tangerang dan wilayah lainnya dikonsolidasi menjadi satu kasus. Pelanggan di berbagai wilayah lainnya keberatan atas keputusan tersebut dan mengajukan keberatan hukum ke MA. Pada tanggal 21 Januari 2009, dalam keputusannya No. 01K/Pdt.Sus/2009, MA menyetujui tuntutan para pelanggan, oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) diproses secara terpisah pada masing-masing pengadilan. Pada tanggal 27 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) oleh beberapa pelanggan tertentu di berbagai wilayah lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa Telkomsel telah mengenakan tarif sesuai dengan peraturan, sehingga gugatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat.

- e. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18.000 juta dan Rp25.000 juta.

Sehubungan dengan Keputusan KPPU tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

- f. Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan memperoleh Surat Menkominfo No. 152/M.KOMINFO/03/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal penjelasan Perhitungan Biaya Hak Penggunaan ("BHP") Frekuensi Telkom Flexi dan Surat Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara Satuan Tugas Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") Sektor Telekomunikasi melalui Surat Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

49. KONTINJENSI (lanjutan)

f. (lanjutan)

Lainnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") No.S-71/OPN.TEKNIS.1.2.2/03/2010. Surat tersebut mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan sehubungan dengan kewajiban historis biaya lisensi BHP Perusahaan dan menerapkan tambahan denda administratif. Perusahaan telah mengakui tambahan kewajiban BHP tersebut dalam laporan keuangan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan berpendapat denda tersebut seharusnya tidak berlaku. Perusahaan sedang meninjau surat tersebut untuk menentukan tindakan yang harus diambil termasuk pertimbangan pengajuan keberatan ke Menkominfo tentang keputusan tersebut.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan anak perusahaan.

50. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2010		2009	
	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Aset				
Kas dan setara kas				
Dolar A.S.	160,47	1.460.249	183,20	2.123.412
Euro	34,73	424.298	47,87	733.626
Dolar Singapura	0,53	3.464	0,21	1.570
Yen Jepang	0,22	21	0,18	22
Ringgit Malaysia	0,03	96	0,03	109
Investasi sementara				
Dolar A.S.	8,62	78.376	8,00	92.280
Piutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dolar A.S.	2,31	21.006	2,34	27.033
Euro	0,08	932	-	-
Pihak ketiga				
Dolar A.S.	69,70	633.803	66,37	766.353
Piutang lain-lain				
Dolar A.S.	0,72	6.589	0,79	9.080
Pound sterling Inggris	0,06	831	0,01	203
Euro	0,01	174	0,02	268
Dolar Singapura	0,01	86	0,00	2
Aset lancar lainnya				
Dolar A.S.	0,84	7.674	0,64	7.429
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya				
Dolar A.S.	2,48	22.627	3,28	37.901
Euro	-	-	0,07	494
Rekening escrow				
Dolar A.S.	4,68	42.502	3,71	42.811
Jumlah aset		2.702.728		3.842.593

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

	2010		2009	
	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kewajiban				
Hutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dolar A.S.	3,02	27.489	6,13	71.005
Dolar Singapura	-	-	2,29	17.477
Pihak ketiga				
Dolar A.S.	110,74	1.008.354	451,66	5.227.853
Euro	11,87	144.968	52,12	798.914
Dolar Singapura	0,46	3.004	1,26	9.616
Yen Jepang	7,93	774	5,61	661
Pound sterling Inggris	0,01	80	0,00	14
Franc Swiss	0,00	28	0,00	16
Dolar Hongkong	0,01	8	0,07	104
Dolar Australia	-	-	0,05	427
Ringgit Malaysia	-	-	0,00	4
Hutang lain-lain				
Ringgit Malaysia	0,55	1.545	-	-
Dolar A.S.	0,13	1.220	0,05	573
Dolar Singapura	0,00	9	0,00	12
Biaya yang masih harus dibayar				
Dolar A.S.	13,32	121.272	10,30	119.243
Yen Jepang	411,70	2.588.237	137,74	16.227
Euro	2,67	32.578	-	-
Dolar Singapura	1,09	7.068	0,03	263
Ringgit Malaysia	-	-	0,54	1.722
Pound sterling Inggris	-	-	0,05	751
Hutang bank jangka pendek				
Dolar A.S.	0,19	1.702	0,38	4.399
Uang muka pelanggan dan pemasok				
Dolar A.S.	0,96	8.766	1,23	14.247
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Dolar A.S.	111,59	1.015.404	125,15	1.448.610
Yen Jepang	767,90	74.931	767,90	90.466
Wesel bayar				
Dolar A.S.	2,94	26.772	-	-
Hutang jangka panjang				
Dolar A.S.	129,05	1.174.314	234,66	2.716.179
Yen Jepang	10.750,57	1.049.041	11.518,46	1.356.990
Jumlah kewajiban		7.287.564		11.895.773
Kewajiban bersih		(4.584.836)		(8.053.180)

Pada tanggal 31 Maret 2010 saldo (kewajiban) aset moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar (US\$122,12 juta) dan Euro20,28 juta. Pada tanggal 31 Maret 2009 saldo kewajiban moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar US\$561,23 juta dan Euro4,16 juta.

Aktivitas Perusahaan dan anak perusahaan membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat hutang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (*UNAUDITED*) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

50. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

Program manajemen risiko Perusahaan dan anak perusahaan secara keseluruhan memberikan perhatian pada sifat pasar uang yang tidak terduga dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi buruk terhadap kinerja Perusahaan dan anak perusahaan. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Jika Perusahaan dan anak perusahaan melaporkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2010 menggunakan kurs tanggal 29 April 2010, laba selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp2.570.305 juta.

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 21 April 2010, Pengadilan Pajak memberitahu Telkomsel bahwa DJP mengajukan banding ke MA atas keputusan pembatalan STP kurang bayar PPh pasal 25 (Catatan 38f.ii). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses.

52. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA

Standar Akuntansi Baru di Indonesia yang relevan terhadap Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

(i) PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang menggantikan PSAK (1998), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan yang terkait.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

52. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan)

(ii) PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" yang menggantikan PSAK 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaannya untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan konsolidasi untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(iii) PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" yang menggantikan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset". PSAK 48 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK 48 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan dan anak perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain *goodwill* sudah tidak terdapat lagi. PSAK 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(iv) PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"

Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan" yang menggantikan PSAK 58 (Revisi 2003), "Operasi dalam Penghentian". PSAK 58 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengklasifikasian dan pengukuran aset tersedia untuk dijual. Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. PSAK 58 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(v) ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan"

Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan". ISAK 10 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. ISAK 10 (Revisi 2009) mengharuskan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (UNAUDITED) (lanjutan)
31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2010 DAN 2009
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

53. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2010, antara lain karena penerapan PPSAK 1 (Catatan 2q.viii) dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan adalah sebagai berikut :

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
Neraca konsolidasian 31 Maret 2009:			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan – bersih	-	76.716	76.716
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(1.238.113)	7.984	(1.230.129)
Pihak ketiga	(8.954.257)	42.403	(8.911.854)
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.980.674)	(161.586)	(7.142.260)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	(2.898.126)	(76.716)	(2.974.842)
Pendapatan Pola Bagi Hasil ditangguhkan	(267.392)	267.392	-
Kewajiban sewa pembiayaan	(292.772)	(156.193)	(448.965)
Laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2009:			
PENDAPATAN USAHA			
Telepon			
Tidak bergerak	2.116.593	1.466.673	3.583.266
Seluler	6.517.451	(18.088)	6.499.363
Pendapatan interkoneksi	2.659.347	(1.567.423)	1.091.925
Data, internet, dan jasa teknologi informatika	3.715.768	291.131	4.006.899
BEBAN USAHA			
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(3.288.635)	(172.293)	(3.460.928)